

# KOMNAS PEREMPUAN

SUARA KEADILAN DAN KEBENARAN

EDITORIAL

Edisi 4 | MARET | 2010

## Periode Keempat Komnas Perempuan

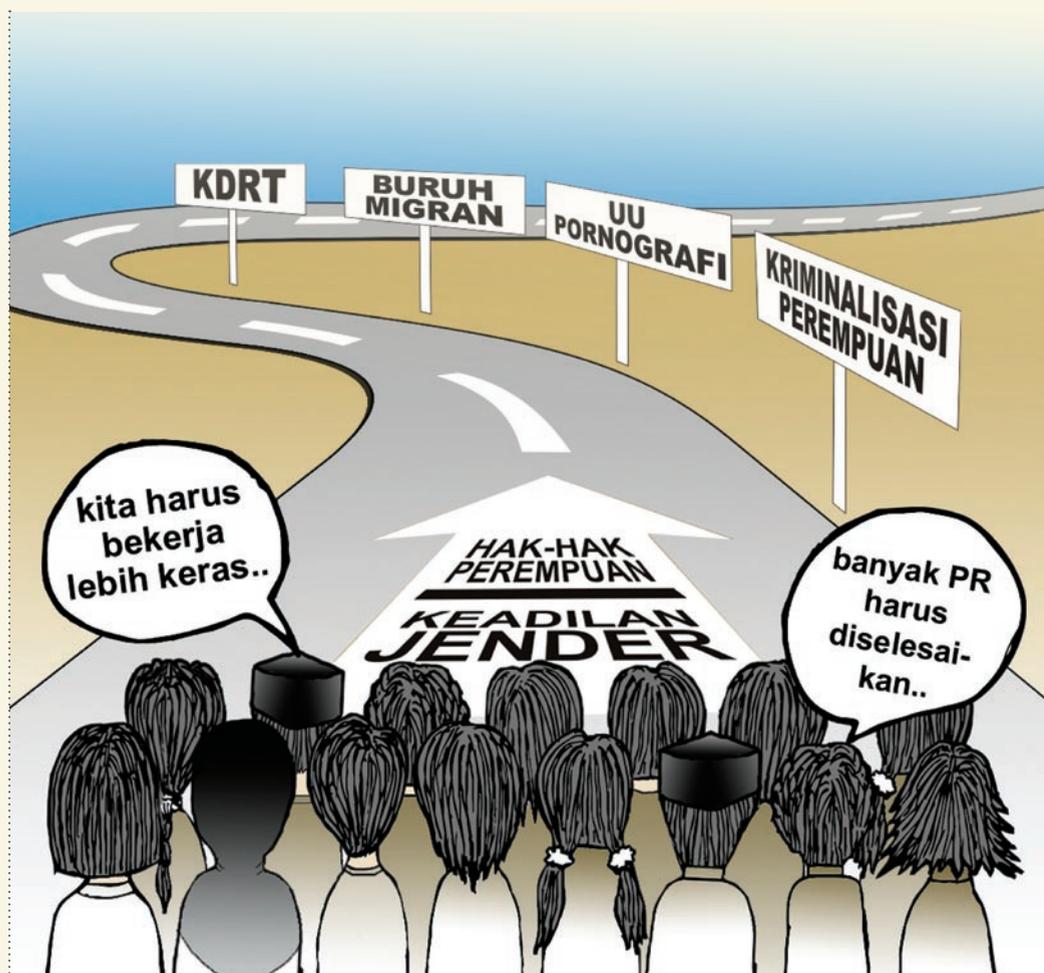
Salam solidaritas,

Akhir 2009 lalu menjadi masa penting bagi perjalanan Komnas Perempuan. Lembaga ini telah memiliki Komisi Paripurna untuk periode 2010-2014, sebagai kepemimpinan babak keempat sejak lembaga ini dibentuk tahun 1998. Dalam kurun waktu 10 tahun, Komnas Perempuan telah menjadi salah satu lembaga yang cukup diperhitungkan dalam upaya advokasi hak-hak perempuan di Indonesia.

Banyak hal telah berubah (begitu dinamis) sejak awal Komnas Perempuan dibentuk, baik perubahan di level lokal, nasional maupun global. Misalnya, kita baru saja mulai terlibat dalam *ASEAN HRs mechanism*. Perkembangan dinamis ini tentu saja menuntut Komnas Perempuan memformulasikan berbagai terobosan kreatif, baik dari segi program maupun strategi, agar bisa terus menjadi lembaga yang mampu secara efektif menjalankan mandatnya dengan terlibat dalam perjuangan penguatan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Inovasi program dan strategi advokasi tidak bisa dielakkan mengingat perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi perempuan. Di sinilah, Komisi Paripurna jilid keempat ini diharapkan mampu memenuhi ekspektasi ini.

Jumlah Komisioner periode ini yang (hanya) 15 orang sebenarnya tidak bisa memenuhi seluruh kepentingan perempuan di negeri kita yang begitu beragam, baik dari segi isu maupun wilayah. Namun, lagi-lagi, justru inilah yang menjadi tantangan para anggota Komisi Paripurna ini untuk tetap semaksimal mungkin membuat perencanaan, pelaksanaan dan distribusi hasil program yang bisa "dinikmati" kelompok perempuan Indonesia sebanyak mungkin. Visi nasional dan global (untuk bekerja tak hanya atas nama kepentingan kelompok sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat (perempuan) Indonesia yang plural) harus menjadi dasar kerja keras para anggota Komisi Paripurna. Dengan demikian, Komnas Perempuan akan bisa terus melanjutkan layanan dan dedikasinya, seperti sejak awal sudah dipatri jejaknya oleh para pionir di generasi sebelumnya.

Konsolidasi internal dan eksternal melalui perspektif kerjasama, keterbukaan dan kesetaraan antar berbagai pihak juga penting dipikirkan para anggota Komisi Paripurna untuk menggapai tujuan-tujuan di atas. Sekali lagi, karena keberagaman kepentingan perempuan negeri ini tak mungkin cukup diakomodasi oleh Komnas Perempuan sendiri, maka memfasilitasi terbangunnya kerjasama



dan *networking* di antara berbagai pihak menjadi hal paling mungkin disumbangkan Komnas Perempuan. Sebagai lembaga publik, Komnas Perempuan juga harus bisa mendorong partisipasi masyarakat luas untuk terlibat dalam pelaksanaan upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Bagian dari upaya penguatan internal Komnas Perempuan dengan Komisi Paripurna periode 2010-2014 dan pengenalan ke luar agar mampu memenuhi segala ekspektasi publik itu, newsletter edisi ini khusus menampilkan tema utama seputar Komisi Paripurna ini. Dengan penerbitan ini, kita berharap banyak pihak, baik di internal maupun eksternal Komnas Perempuan, termasuk masyarakat luas, dapat lebih mengenal dan mendukung keberadaan dan kerja Komnas Perempuan dan Komisi Paripurna 2010-2014 ini.

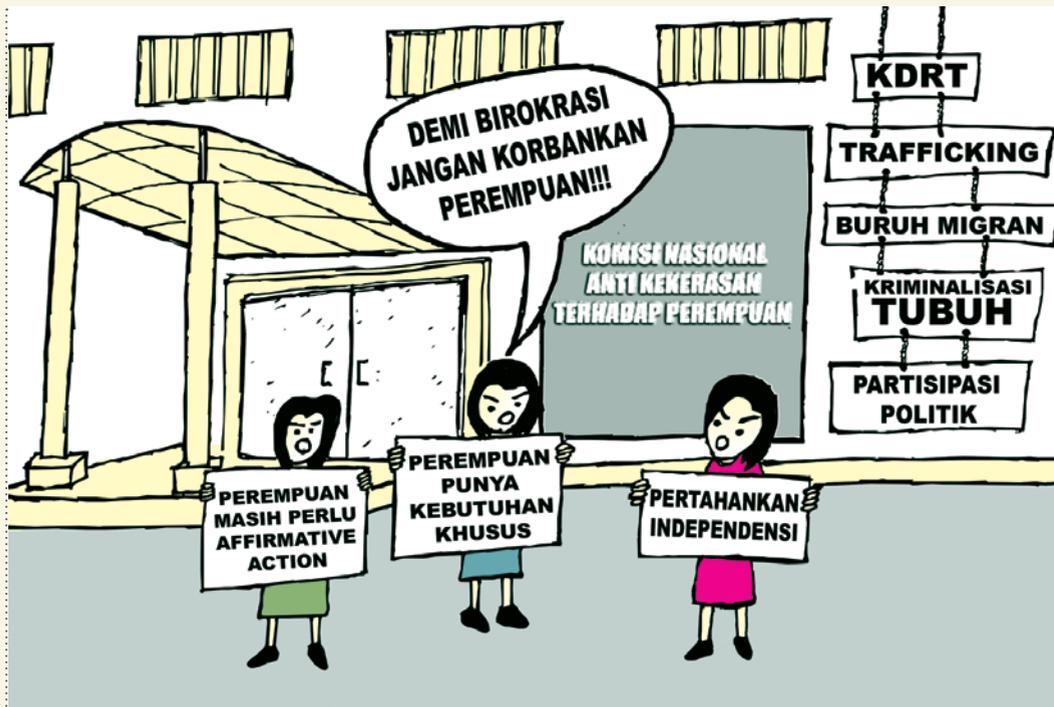
Selamat membaca....

Diah Irawaty

## APA KABAR KOMNAS PEREMPUAN ?

Oleh Tati Krisnawaty

adalah anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2000-2003 dan 2003-2006 dan juga salah satu anggota Tim Independen Pemilihan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2010-2014.



Seorang teman bertanya, "Apakah Komnas Perempuan akan *survive* melintasi lima tahun ke depan? Ops! Saya sempat terperangah dengan pertanyaan yang terdengar provokatif itu. Ada apa?"

Teman itu ternyata menghubungkan pertanyaannya dengan dua hal. Pertama, kabar tentang akan dileburnya Komnas Perempuan dengan Komnas HAM dan, kedua, komposisi komisioner yang baru saja terpilih untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Saya bisa memahami pertanyaan eksistensial tersebut, meskipun saya sendiri tidak memiliki kekhawatiran

mana letak Komnas Perempuan? Perlukah Komnas Perempuan dileburkan dengan Komnas HAM? Saya mendengar kabar bahwa saat ini sedang berlangsung proses dialog antara Komnas Perempuan dengan berbagai pihak yang menindaklanjuti wacana peleburan ini.

### Akar Komnas Perempuan

Mungkin kita perlu menegaskan pertanyaan tentang apa ukuran dan bagaimana mengukur nilai lebih dari peleburan Komnas Perempuan dengan Komnas HAM. Dalam menjawab pertanyaan itu tidak bisa tidak, kita perlu menoleh pada sejarah berdirinya Komnas Perempuan, pada tragedi kerusuhan dan perkosaan Mei 1998, pada gerakan masyarakat anti kekerasan yang mendorong Presiden RI atas nama negara meminta maaf kepada para korban. Komnas Perempuan dilahirkan oleh peristiwa sejarah kekerasan yang menyakitkan perempuan dan mengoyak-ngoyak kehidupan bangsa. Komnas Perempuan dihidupkan untuk membangun sistem dan budaya yang kondusif bagi upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan

yang jauh atas keberadaan Komnas Perempuan. Teguh tidaknya Komnas Perempuan dipengaruhi oleh banyak hal.

Wacana peleburan Komnas Perempuan dengan Komnas HAM memang ada, tetapi sejauh ini wacana ini tidak digagas baik oleh Komnas Perempuan maupun Komnas HAM sendiri. Wacana ini datang dari Sekretariat Negara (Setneg) yang berniat menata ulang keberadaan institusi-institusi non departemen termasuk keberadaan komisi-komisi nasional yang jumlahnya luar biasa banyak. Sebagian tidak jelas manifestasi fungsinya, sebagian lainnya dianggap bertumpang tindih, tetapi tidak sedikit jumlah lembaga non departemen atau komisi-komisi nasional yang telah menunjukkan kinerja baik. Di

## DAFTAR ISI

- 1 EDITORIAL
- 2 FOKUS UTAMA
- 5 PROFIL
- 13 PANTAU
- 14 PUBLIKASI
- 15 SUARA
- 17 AKTIVITAS
- 23 GLOSARIUM
- 24 PUNDI PEREMPUAN

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMNAS PEREMPUAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Penanggung Jawab

1. Sylvana Maria Apituley
2. Arimbi Heroepoetri
3. Neng Dara Affiah
4. Husein Muhammad

Pimpinan Redaksi

Diah Irawaty

Redaktur Pelaksana

Nunung Qomariyah

Alamat Redaksi

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Telp. (021) 3903963, Fax.: (021) 3903922

www.komnasperempuan.or.id

Silakan kirim masukan dan kritik

Anda ke [redaksi@komnasperempuan.or.id](mailto:redaksi@komnasperempuan.or.id)

adalah monumen hidup tempat kita tidak melupakan sejarah, tempat kita belajar menghargai martabat kemanusiaan perempuan dan melakukan tindakan struktural yang nyata untuk melindunginya. Jika Komnas Perempuan harus dilebur dengan organisasi lain, Komnas Perempuan akan *survive* selama memiliki ruang yang luas dan subur untuk pertumbuhan akar keberadaannya, yaitu kesadaran atas adanya ketidakadilan berbasis gender dan sekaligus komitmen atau tindakan untuk mengakhiri ketidakadilan tersebut. Tanpa ruang ini, Komnas Perempuan akan kehilangan jati dirinya.

### Jejak Kerja dan Budaya Organisasi

Sebelum terburu-buru memutuskan dilebur atau tidak, kita juga perlu melihat jejak kerja Komnas Perempuan selama 10 tahun lebih; jejak kerja yang kemudian menjadi bagian dari peneguhan pondasi keberadaan lembaga ini, menjadi tiang-tiang penyangga misi yang diembannya, serta menjadi karakter dari budaya organisasi Komnas Perempuan. Jika Komnas Perempuan dilebur dengan organisasi yang budaya kerjanya berbeda secara mendasar, mungkin keduanya akan sama-sama menderita.

### Meletakkan Kondisi dan Aspirasi Perempuan Korban Kekerasan di Pusat Pertimbangan

Sejak berdiri hingga melintasi 10 tahun keberadaannya, Komnas Perempuan mengembangkan program kerjanya dengan pertimbangan utama menghormati kondisi dan aspirasi perempuan korban. Bekerjanya berbagai subkom dalam Komnas Perempuan, termasuk lahirnya sejumlah mekanisme pelapor khusus dan gugus kerja adalah upaya mencari kebenaran, meniti keadilan, dan membangun pemulihan bagi para korban, termasuk di antaranya adalah perempuan-perempuan korban kerusuhan Mei 1998, Tragedi 1965, konflik bersenjata di beberapa wilayah Indonesia (Aceh, Papua, Poso), konflik sumberdaya alam, kebijakan diskriminatif, perempuan pengungsi, dan perempuan buruh migran. Komnas Perempuan memang tidak memiliki mandat untuk kerja langsung di tingkat pendampingan dan layanan konseling untuk korban. Peran Komnas Perempuan adalah mendorong dan mendukung berbagai inisiatif yang ada di berbagai ranah (negara dan masyarakat) dengan mendasarkan diri pada data dan fakta kekerasan terhadap perempuan yang dianalisa dengan perspektif HAM dan perspektif keadilan berbasis gender.

### Belajar Bersama, Memaknai Tanggung Jawab: Sebuah Jalan Sunyi

Jejak kerja Komnas Perempuan selama 10 tahun terakhir (1999-2009) cenderung mengesankan pilihan jalan panjang

dan jalan sunyi kendati isu-isu yang diperjuangkannya sangat mendasar dan mendesak seperti pelanggaran hak-hak konstitusional perempuan dengan keberadaan Perda-perda diskriminatif di berbagai daerah, pelanggaran HAM perempuan Ahmadiyah, pembiaran negara atas kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan buruh migran /Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tidak ada hingar bingar kutuk-mengutuk, *ngamuk*, atau demonstrasi yang melibatkan massa. Untuk penegakan HAM dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan memilih jalan panjang dengan mengumpulkan data, fakta atau kesaksian secara cermat yang dikumpulkan dari lapangan (baik dari korban, lembaga masyarakat maupun institusi negara di tingkat daerah dan pusat) disertai dengan analisa dan rekomendasi untuk berbagai pihak. Komnas Perempuan juga merintis dan memfasilitasi forum belajar di berbagai wilayah di Indonesia dengan partisipan yang beragam dari unsur lembaga masyarakat, institusi negara di daerah dan pusat (legislatif, eksekutif, yudikatif atau penegak hukum), akademisi, dan kalangan media. Forum ini dihidupkan untuk membuka ruang dialog, membangun pemahaman yang lebih baik dari berbagai perspektif, serta membuka peluang kerjasama. Pada isu TKW, *Komnas Perempuan* juga mengundang kalangan bisnis untuk terlibat dalam perumusan penanganan masalah TKW berperspektif HAM.

Komnas Perempuan berkeyakinan bahwa penataan kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan upaya penegakan HAM perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan; semua ini akan berjalan bila semua unsur dalam negara dan masyarakat ikut serta mengambil bagian dengan pendekatan struktural dan kultural. Jalannya panjang, di lapangan, dan tidak ribut. Pertanggungjawaban kerja Komnas Perempuan kepada publik pada gilirannya bukan hanya ritual formalitas penyampaian kertas laporan berkala, tetapi juga melalui proses yang hidup di dalam program belajar bersama, menilai bersama sudah sejauh mana kita sebagai bangsa melangkah menegakkan HAM dan menghapuskan budaya kekerasan terhadap perempuan.

*Tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan sangat kompleks, sudah pasti. Kemiskinan yang akut di sebagian besar lapisan masyarakat, kesenjangan pembangunan dan langkanya akses perempuan miskin pada perbaikan kondisi hidup, perubahan iklim global, kerentanan penegakan hukum, politik yang mengabdikan kekerasan dan kekuasaan, pada gilirannya mengukuhkan budaya patriarki yang diskriminatif, merendahkan, mengeksploitasi perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai sasaran kekerasan.*

### Konsultasi Nasional dan Kerjasama dengan Masyarakat

Meskipun Komnas Perempuan berdiri sebagai institusi nasional dengan landasan Peraturan Presiden, dalam budaya kerja yang telah dibangun selama 10 tahun, Komnas Perempuan memposisikan diri di tengah, di antara masyarakat dan lembaga negara. Dalam penyusunan berbagai

programnya, Komnas Perempuan selalu melakukan kegiatan konsultasi nasional dengan mengundang wakil-wakil dari berbagai daerah di Indonesia. Komnas Perempuan juga terlibat aktif dalam berbagai inisiatif aliansi lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk penegakan HAM dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, seperti Jaker Prolegnas, JKP3, ALIMAT, JALA PRT, dan ARRAK (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990). Ini mungkin merupakan keunikan Komnas Perempuan dibandingkan dengan komisi-komisi nasional yang lain. Bekerjanya proses konsultasi publik dan kerjasama yang intensif dengan lembaga-lembaga di masyarakat.

Tetapi, hal ini berlangsung bukan tanpa resiko. Seringkali Komnas Perempuan oleh institusi negara dikategorikan sebagai bagian dari komunitas LSM ketimbang komunitas komisi nasional. Adakalanya juga oleh pihak di luar jaringan, Komnas Perempuan dituding merampas ranah kerja LSM. Tentu juga Komnas Perempuan tidak bisa menghindari dari berbagai dinamika dan friksi yang biasa terjadi dalam sebuah jaringan. Di tengah berbagai gelombang isu dan relasi, sejauh ini, kegiatan konsultasi nasional dan berpartisipasi dalam jaringan LSM telah mendekatkan Komnas Perempuan pada pemangku kepentingan penegakan HAM perempuan. Jika Komnas Perempuan nanti dilebur dengan Komisi Nasional yang tidak memiliki budaya kerja ini, apakah tradisi kerja yang baik ini akan dapat dipertahankan?

### Hubungan Internasional

Yang juga unik dari Komnas Perempuan adalah kapasitasnya mengisi dan menggunakan ruang-ruang kerja di tingkat regional (Asia Pacific) dan internasional. Komnas Perempuan, atas inisiatifnya sendiri maupun dalam konteks kerjasama nasional dan regional berkali-kali mengundang Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) dan pejabat PBB lainnya yang bekerja untuk penegakan HAM datang ke Indonesia; di antaranya adalah Pelapor Khusus masalah Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab, dan Konsekuensinya serta Pelapor Khusus Hak Semua Buruh Migran. Analisa Komnas Perempuan bersama aliansi kerjanya di dalam dan luar negeri disampaikan atau disumbangkan atau dijadikan acuan dalam berbagai forum kerjasama internasional seperti dalam *Asia Pacific Forum on National Human Rights Institutions*.

Memasuki ranah ini bukan tanpa perjuangan karena mekanisme HAM internasional yang resmi hanya mengakui satu perwakilan institusi HAM nasional dalam forum mereka, dan itu adalah Komnas HAM. Komnas Perempuan dengan data-data kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang la kumpulkan, berhasil menembus hambatan struktural yang ada dengan berbasiskan pada prinsip universalitas HAM dan universalitas perjuangan HAM.

### Lima Tahun ke Depan

Empat elemen budaya organisasi Komnas Perempuan yang (a) dimulai dengan *penempatan kondisi dan aspirasi perempuan korban kekerasan di titik pusat pertimbangan Komnas Perempuan*; (b) dilandasi dengan *kerendahan hati untuk terus belajar bersama dengan berbagai pihak* (negara dan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia); (3) dijaga dengan *keterbukaan menerima pandangan, kritik, dan saran publik lewat mekanisme konsultasi nasional dan berbagai bentuk kerjasama*, dan (4) dikuatkan dengan *keaktifan membangun hubungan internasional dan optimalisasi penggunaan mekanisme HAM internasional*, sebagaimana yang telah dielaborasi di atas, menurut saya merupakan modal besar.

Tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan sangat kompleks, sudah pasti. Kemiskinan yang akut di sebagian besar lapisan masyarakat, kesenjangan pembangunan dan langkanya akses perempuan miskin pada perbaikan kondisi hidup, perubahan iklim global, kerentanan penegakan hukum, politik yang mengandalkan kekerasan dan kekuasaan, pada gilirannya mengukuhkan budaya patriarki yang diskriminatif, merendahkan, mengeksploitasi perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai sasaran kekerasan. Belum lagi tantangan internal yang tak kalah peliknya, seperti masalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan kerumitan-kerumitan dalam birokrasi yang dihadapi institusi dengan predikat komisi nasional.

Gagasan untuk meleburkan Komnas Perempuan dengan Komnas HAM tentu saja harus disambut dengan perhitungan matang, dengan mempertimbangkan akar sejarah keberadaan Komnas Perempuan dan budaya organisasi Komnas Perempuan yang telah terbangun serta melalui proses dialog yang konstruktif, partisipatif, dan terbuka.

Sepuluh Komisioner baru telah terpilih melengkapi lima komisioner yang telah bekerja pada tiga tahun sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, melamar untuk mendedikasikan dirinya pada Komnas Perempuan, melintasi proses dialog publik dan proses seleksi pencalonan yang ketat. Ketua dan wakil ketua serta ketua-ketua sub komisi juga telah terpilih melalui proses demokratis di tingkat internal Komnas Perempuan. Tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas mereka dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan lima tahun mendatang. Apalagi jika budaya organisasi yang telah teruji selama 10 tahun ke belakang dapat didayagunakan dan dioptimalkan.

Peneguhan fungsi lembaga ini menjadi kepentingan kita semua. Selamat bekerja untuk komisioner dan badan pekerja semua. Semoga kabar baik dan kabar yang mendebarkan akan menjadi api semangat untuk menjadikan Komnas Perempuan semakin jelas kegunaannya baik untuk para korban kekerasan maupun untuk kita semua sebagai bangsa yang belajar, bangsa yang tidak akan membiarkan sejarah kekerasan terhadap perempuan berlangsung terus di sekitar kita.

## AGENDA PRIORITAS 100 HARI KEPEMIMPINAN NASIONAL

### PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN WAKIL PRESIDEN BOEDIONO DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN<sup>1</sup>

Komnas Perempuan telah melakukan proses evaluasi implementasi kerja 100 hari kepemimpinan baru Presiden SBY-Boediono dengan serangkaian kegiatan yaitu dialog bersama mitra, konsultasi dengan Kementerian terkait, verifikasi dokumen dan pelaporan-pelaporan yang dilakukan berbagai institusi pemangku kepentingan dan pemangku hak. Pada akhirnya, Komnas Perempuan mengapresiasi upaya-upaya 100 hari Presiden untuk mencapai prioritas-prioritas yang menjadi harapan dan peluang bagi terpenuhinya pemenuhan hak konstitusional perempuan. Namun, Komnas Perempuan mencatat bahwa agenda prioritas pemenuhan hak konstitusional perempuan masih belum memenuhi harapan.

Pada tanggal 24 Juni 2009, Komnas Perempuan memfasilitasi sebuah dialog antara 53 perempuan pemimpin dari 45 organisasi yang bekerja di tingkat nasional dan daerah, termasuk organisasi komunitas korban, lembaga pelayanan bagi korban kekerasan, ormas perempuan dan keagamaan,

komunitas pekerja seni, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menggeluti masalah lingkungan hidup dan migrasi tenaga kerja.

Temu Perempuan ini menghasilkan sejumlah masukan konkrit yang mencerminkan aspirasi perempuan pejuang HAM, keadilan dan demokrasi terkait agenda kepemimpinan nasional 2009-2014 dan sehubungan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Hasil Temu Perempuan ini adalah rumusan aspirasi dan desakan menyangkut agenda kepemimpinan Presiden terpilih untuk 100 hari pertama dan selama lima tahun masa jabatan

#### Agenda Prioritas 1

Selaku Kepala Negara membatalkan kebijakan diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari upaya menjalankan mandatnya sebagai pelaksana konstitusi dan penjaga integritas hukum nasional serta kebhinekaan tunggal ika bangsa.

#### Agenda Prioritas 2

Menyusun *grand design* politik hukum nasional yang menjamin pelaksanaan konstitusi nasional.

#### Agenda Prioritas 3

Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelembagaan permanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota.

#### Agenda Prioritas 4

Mempercepat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai TAP MPR No. IX tahun 2001 yang memberikan akses dan kontrol pengelolaan kekayaan alam kepada rakyat, termasuk perempuan dan menjamin kedaulatan pangan.

#### Agenda Prioritas 5

Menginstruksikan kepada Kedubes di negara-negara tujuan buruh migran untuk membentuk layanan terpadu bagi perlindungan terhadap hak-hak buruh migran termasuk menyediakan fasilitas *shelter* yang memadai.

#### Agenda Prioritas 6

Melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar korban lapindo, khususnya bagi perempuan dan anak yang selama ini terabaikan.

#### Agenda Prioritas 7

Sebagai Kepala Negara mengajak bangsa Indonesia untuk menjadikan masa lalu termasuk pengalaman pelanggaran HAM, sebagai landasan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dengan memastikan tidak berulangnya pelanggaran serupa.

#### Agenda Prioritas 8

Selaku Kepala Negara meminta maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, serta menyatakan komitmen untuk menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun mekanisme independen lainnya untuk penegakkan HAM yang telah dibentuk oleh Negara.

<sup>1</sup> Siaran pers Komnas Perempuan dalam rangka 100 hari kepemimpinan nasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Jumat 12 Februari 2010

## Husein Muhammad, Kiai Feminis: “Tuhan Selalu Menghendaki Kebaikan dan Keadilan bagi Manusia”

Oleh Nunung Qomariyah

Di kalangan gerakan perempuan Muslim Indonesia, Kiai Husein Muhammad barangkali menjadi figur yang amat penting saat ini. Bagaimana tidak, pria kelahiran Cirebon 57 tahun lalu ini merupakan pendiri sekaligus pucuk pimpinan beberapa organisasi pendukung wacana gender dalam konteks keislaman. Sebut saja PUAN Amal Hayati (Pesantren untuk Pemberdayaan Perempuan), sebuah lembaga sosial-kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan kaum perempuan; Rahima, sebuah organisasi yang memfokuskan pada pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan; dan Fahmina Institute, organisasi di Cirebon yang berfokus pada pengkajian agama, sosial dan penguatan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut didirikan dua tahun setelah gaung reformasi ditabuh.

Berdirinya ketiga lembaga tersebut perlu menjadi catatan tersendiri bagi perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Setidaknya di tengah banyaknya wacana feminisme yang sedang berkembang saat itu, ketiga lembaga tersebut memberikan tawaran baru tentang feminisme dalam konteks Islam. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, yang sering tidak mudah menerima hal-hal baru terkait wacana feminisme yang telah digaungkan oleh beberapa aktivis dan organisasi perempuan di Indonesia pada sekitar tahun 80-an.

Hingga hari ini, Kiai Husein adalah satu dari sedikit kiai yang telah memantapkan diri untuk terus memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan ini dilakukannya karena keyakinan bahwa itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. “Tuhan selalu menghendaki kebaikan dan keadilan bagi manusia”, terangnya.

Pemikiran dan cara pandang Kiai Husein seperti sekarang ini bukan tanpa proses dan tantangan, baik dari diri sendiri terlebih dari pihak luar. “Kesadaran” itu bermula ketika dirinya mengikuti *halaqah* (forum diskusi) yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pimpinan Masdar F Masudi bekerjasama dengan *Rabithah al Ma’ahid al-Islamiyah* (RMI) atau Ikatan Pondok Pesantren se-Indonesia pada tahun 1988. *Halaqah* yang mengupas bagaimana cara memahami kitab kuning secara kontekstual dan mengkaji konteks historisnya ini banyak diikuti oleh para kiai pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia.

Tentu tidak mudah bagi Kiai Husein menerima wacana yang digulirkan oleh beberapa aktivis hak-hak perempuan seperti Lies Marcoes, Masdar Farid Mas’udi, Mansour Fakhri dan Wardah Hafidz dalam forum diskusi tersebut, terlebih wacana tentang kesetaraan gender. Puluhan tahun pengetahuan yang “keliru” tentang relasi perempuan dan laki-laki yang timpang telah tertanam begitu kuat dalam dirinya. Tidak berlebihan jika Kiai Husein menyebut para aktivis tersebut telah “mengacaukan” bangunan epistemologi tentang keilmuan Islam yang telah diyakininya. Tak ayal sepulang dari diskusi, kiai segera berprasangka bahwa apa yang disampaikan oleh para aktivis tersebut merupakan kekeliruan yang fatal, sehingga harus “diluruskan”.

Berhari-hari, berbulan-bulan, Kiai Husein menelusuri kembali kandungan keilmuan pesantren yang terdapat di banyak teks-teks klasik. Alih-alih menemukan referensi untuk meng-*counter* wacana yang ditabur oleh para aktivis tersebut, justru dirinya terhentak dengan hasil penelusurannya yang memperlihatkan bagaimana produk pikiran keagamaan dalam warisan klasik telah sedemikian dalam mereduksi prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan dan keadilan manusia. Baginya, warisan klasik tersebut dianggap sarat dengan pandangan-pandangan keagamaan yang mensubordinasi, memarjinalkan, mendiskriminasi dan membatasi eksistensi perempuan hampir dalam seluruh ruang kehidupan mereka.

Meskipun “kesadaran baru” yang diterimanya relatif terlambat, Kiai Husein tetap bersyukur karena Tuhan mengirim para aktivis perempuan itu untuk memberikan “pencerahan”. “Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan jalan pengetahuan kepada saya untuk memahami problem relasi laki-laki dan perempuan baik di dalam ruang domestik (rumah tangga) maupun publik (kehidupan kemasyarakatan)”, tuturnya.



Husein Muhammad

Dok. Komnas Perempuan.

Sejak saat itu, Kiai Husein bertekad untuk terus memajukan harkat dan martabat perempuan seperti yang dicita-citakan oleh Islam itu sendiri. Meskipun tekad tersebut membawa banyak konsekuensi, berhadapan atau bahkan “berkonflik” dengan banyak kiai-kiai pengasuh pondok pesantren, namun ia tetap tidak gentar. Terbukti, dua buku yang mengupas tentang perempuan dalam pandangan Islam telah dituliskannya, yaitu *Fiqih Perempuan* dan *Agama Ramah Perempuan*.

Selain bergerak pada wilayah intelektual, kiai juga pernah terlibat secara aktif pada politik praktis sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 1999-2004. Menjadi anggota DPRD ternyata tidak mudah bagi Kiai Husein. Hingga masa jabatannya berakhir, dirinya belum bisa memahami logika politik. “Menjadi politisi berarti harus siap menjadi milik semua orang. Hingga semua orang berhak meminta semuanya, menggugat, menghujat bahkan harus menyediakan dan mengembalikan semuanya”.

Meskipun tidak berhasil mendesakkan isu perempuan dalam sebuah kebijakan, Kiai Husein bisa dikatakan cukup berhasil memasukkan wacana dan isu gender sekaligus gender *budgeting* dalam perdebatan dan diskusi-diskusi yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Tak ayal Kiai Husein sempat mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah sebagai pelopor dan penggerak kesetaraan dan keadilan gender.

Sepak terjangnya tidak hanya sampai di situ. Berkat dorongan banyak pihak, Kiai Husein mencalonkan dan lolos menjadi satu dari dua orang laki-laki yang diterima sebagai anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2007-2009. Kiai Husein berharap dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia bisa menyumbang untuk mengurai benang kusut akar masalah ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki yang bagi banyak pihak dianggap bersumber pada ajaran-ajaran agama. Satu hal yang juga penting adalah dukungan kepada isterinya, Lilik Nuhayah untuk berpolitik. Sang isteri kini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Menjadi aktivis laki-laki di tengah 13 perempuan Anggota Komisi Paripurna tidak membuatnya canggung. Justru Kiai Husein sangat senang bisa menemukan sosok-sosok perempuan hebat yang tidak pernah lelah memperjuangkan nasib perempuan korban kekerasan seperti Saparinah Sadli, Kamala Chandrakirana, Sjamsiah Ahmad yang merupakan sosok-sosok perempuan yang la kagumi.

Kini tiga tahun sudah Kiai Husein mendedikasikan dirinya di Komnas Perempuan. Melalui pemilihan anggota Komisi Paripurna periode 2010-2014 yang lalu, Kiai Husein kembali dipercaya menjadi salah satu anggota Komisi Paripurna hingga lima tahun mendatang. Kiai Husein berharap dalam lima tahun ke depan Komnas Perempuan mampu membuat pondasi yang kokoh bagi tegaknya keadilan perempuan. “Budaya tidak bisa dipungkir menjadi salah satu akar yang terus melanggengkan ketimpangan perempuan dan laki-laki, sehingga gerakan kultural menjadi sebuah keniscayaan” ungkap Kiai Husein tegas. Selamat berjuang Kiai.

## Gerakan Perempuan Indonesia dan Komnas Perempuan Di Mata Dua Feminis Internasional

Oleh Diah Irawaty

Cecilia Ng, pejuang hak-hak perempuan berkebangsaan Malaysia, dan Kumidini Therese Samuel –biasa disapa Kumi–, feminis Sri Lanka, hadir di Indonesia untuk mengikuti serangkaian kegiatan Komnas Perempuan akhir tahun lalu. Keduanya berkesempatan memberikan pandangannya tentang perkembangan gerakan perempuan di Indonesia dan posisi penting Komnas Perempuan dalam perjuangan hak-hak perempuan di negeri ini.

Di mata Cecilia Ng, gerakan perempuan di Indonesia semakin menguat dan mengalami peningkatan yang signifikan pasca keruntuhan Presiden Soeharto yang dibarengi dengan bangkitnya gerakan masyarakat (*civil movement*). Gerakan reformasi atau gerakan demokratisasi telah menjadi pintu masuk upaya penguatan hak-hak perempuan. Beragam tingkatan gerakan perempuan, mulai dari level akar rumput hingga level pemerintah terlibat aktif dalam upaya itu. Ini merupakan bagian penting dari proses transisi menuju demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia.

Terkait persoalan yang dihadapi perempuan dan gerakan perempuan Indonesia, Cecilia menilai hampir sama dengan yang dialami oleh perempuan dan gerakan perempuan di Malaysia. Tantangan besar yang harus dihadapi adalah neoliberalisme, globalisasi ekonomi, politik identitas dan *patriarchal state*. Baginya hal-hal tersebut merupakan penghambat pencapaian hak-hak perempuan dan tegaknya keadilan.

Cecilia berpendapat, kiprah Komnas Perempuan yang sangat aktif mendukung agenda-agenda gerakan perempuan di Indonesia patut diperhitungkan. Cecilia menyatakan, kehadiran



Dok. pribadi.

Cecilia Ng

Komnas Perempuan sangat penting dalam melegitimasi perjuangan hak-hak perempuan dan keadilan sosial mengingat posisi strategis Komnas Perempuan sebagai lembaga bentukan negara yang memiliki independensi. Sebagai agen negara yang mendorong kebijakan dan monitoring implementasi program perempuan, pengalaman sukses dan kegagalan menjadi hal yang niscaya. Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan dan pengaruh yang dimiliki Komnas Perempuan?

Komnas Perempuan perlu memperhatikan mandatnya untuk menjembatani kepentingan Negara dan masyarakat sipil. Tentu bukan menjadi hal aneh bila ada kekhawatiran bahwa Komnas Perempuan tidak akan dapat mengakomodasi semua kepentingan kelompok perempuan Indonesia yang memang sangat beragam. Bagaimana Komnas Perempuan berupaya menjawab persoalan ini? Cecilia berpendapat, kita tidak seharusnya mengesensialkan perempuan; penting untuk mendatangi kelompok akar rumput dan mendengarkan kebutuhan kelompok perempuan dan juga laki-laki, utamanya di tingkat komunitas. Komnas Perempuan harus dapat merangkul semua kelompok, mengakomodir keragaman dan tidak membiarkan ideologi atau tren tertentu mendominasi. Komnas Perempuan diharapkan dapat menjadi ajang dan ruang konsultasi dan umpan balik (*feedback*), karena Komnas Perempuan harus terbuka menerima masukan dan kritik.

Sementara, Kumidini Therese Samuel mengapresiasi upaya Komnas Perempuan dalam melakukan banyak hal dengan berbagai kelompok atau komunitas yang berbeda-beda. "Ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi lembaga ini", untkanya. Dalam pandangannya, Komnas Perempuan berhasil mengajak banyak kelompok yang beragam itu sehingga perbedaan ini tidak banyak menimbulkan masalah. Hasilnya, terbangunnya solidaritas, ikatan dan pandangan saling pengertian di antara berbagai komunitas dengan beragam isu dan wilayah yang selanjutnya melahirkan toleransi, tidak kompromi pada radikalisme, dan tidak memberi ruang hegemoni bagi kelompok tertentu. Bila pemahaman dan pengertian atas perbedaan wilayah dan keanekaragaman budaya sudah dibangun, toleransi akan muncul dan solidaritas akan lahir bersamaan.

Lebih lanjut, Kumi menyampaikan bahwa Komnas Perempuan merupakan lembaga yang sangat unik dan potensial untuk upaya penguatan keadilan gender dan penegakan hak-hak perempuan. Sebagai komisi nasional, Komnas Perempuan berhasil menggabungkan pemikiran feminis dan kepemimpinan feminis dengan cukup kuat. Komnas Perempuan telah berupaya keras untuk mengangkat berbagai isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, seperti kekerasan yang terjadi dalam Tragedi Mei 1998, peristiwa 1965, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan di wilayah konflik.

Kumi juga menghargai inisiatif Komnas Perempuan dalam melakukan kerja dengan membangun ruang bagi para perempuan yang mengalami kekerasan untuk bersuara, kemudian aktif mendokumentasikan berbagai kejadian besar dan juga memberikan analisis kritis dan implikasinya di masa yang akan datang. Yang menarik, menurutnya, dalam kerja ini, Komnas Perempuan juga memanfaatkan metodologi feminis baru seperti dialog intergenerasi yang juga berkontribusi pada pembentukan keterlibatan yang feminis (*feminist engagements*) di berbagai level masyarakat. Meski demikian, Kumi mengingatkan, penegakan hukum (*law enforcement*) dan kultur patriarkhal yang masih kuat menjadi hambatan serius dalam penegakan hak asasi perempuan dan keadilan dan kesetaraan gender.

Komnas Perempuan, masih menurut Kumi, juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam advokasi kebijakan dan mempengaruhi cara berfikir dan bersikap masyarakat. Perlu ada perubahan pemikiran (*mindset*) publik terhadap isu perempuan dan gender dan Komnas Perempuan harus bekerja keras memaksimalkan peran dalam perubahan ini. Apalagi, Komnas Perempuan sudah cukup banyak berinteraksi dengan berbagai komunitas yang berbeda dan membuat jaringan yang solid dengan mereka, baik dari kelompok isu, daerah dan komunitas marjinal lainnya.

Posisi Komnas Perempuan yang berada di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat sipil mendapat sorotan khusus dari Kumi. Sarannya, Komnas Perempuan harus dapat, satu sisi, berkontribusi pada perubahan kebijakan dan, sisi lain, memberikan keuntungan bagi penguatan gerakan; Komnas Perempuan perlu memfasilitasi forum dialog yang melibatkan pemerintah dan elemen masyarakat sipil (*civil society*). Ke depan, Kumi memberi masukan agar Komnas Perempuan harus bekerja lebih keras dalam membangun kerjasama dengan semua elemen gerakan perempuan di Indonesia dan mengakomodir kepentingan publik yang beragam. Komnas Perempuan harus dapat meningkatkan kualitas program dan menjalankan fungsi pemantauan (monitoringnya) serta membangun negosiasi dan interaksi dengan unsur gerakan perempuan.

## Sjamsiah Ahmad tentang Gerakan Perempuan dan CEDAW di Indonesia

**S**jamsiah Ahmad adalah sedikit dari perempuan Indonesia yang malang melintang dalam upaya penguatan hak-hak perempuan di dunia. Pengalamannya yang luas di dunia internasional memberinya kesempatan mengikuti berbagai proses advokasi bagi penguatan hak-hak perempuan dan keadilan gender, termasuk terkait CEDAW dan konferensi dunia tentang perempuan lainnya. Untuk mengenal lebih dekat pengalaman dan pemikiran Sjamsiah Ahmad dalam gerakan perempuan ini, Diah Irawaty dari Redaksi mewawancarainya. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di kantor Komnas Perempuan sebelum demisioner dari anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2007-2009 Jakarta.

### Bagaimana awal mula keterlibatan Ibu dalam gerakan perempuan dan apa motivasi Ibu?

Tahun 1978, saya direkrut untuk bekerja di *UN Office for Science dan Technology* di New York (kantor PBB untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/IPTEK). Saya ditawarkan pekerjaan ini, tidak melamarnya. Saya tidak melewati prosedur [aplikasi kerja].

### Bagaimana bisa ditawarkan pekerjaan di UN?

Mundur lagi ke 1976, ada *Asean Ministers of Science Meeting* di Bangkok. Waktu itu tidak ada *Ministry of Science* di negara kita. Yang datang adalah ketua LIPI dan sejak tahun 1967 LIPI dibentuk, saya menjadi Ketua Biro Hubungan Internasional. Saya mempelajari *science* dan teknologi. Dalam pertemuan di Bangkok itu, setiap negara harus membuat *statement*, bagaimana kerjasama di Asia. Ketua LIPI yang mengadakan perjalanan ke luar negeri menyampaikan *statement* di Bangkok. Waktu itu, saya yang menyiapkan *statement*-nya di Jakarta dan menyampaikan bahwa dua tahun sekali UNESCO, yang mengurus *science*, mengadakan *general conference*. Saya sendiri tidak tahu ada *UN Office for Science and Technology* di New York. Ketua LIPI mengatakan, kalau ada rapat di tingkat dunia, kenapa kita di Asia tidak ikut dan bersiap untuk konferensi dunia nanti. Berkaitan dengan itu, sebenarnya Indonesia sudah tahu; tahun 1963, pertama konferensi dunia tentang *science* untuk (negara-negara berkembang) *developing countries*. Waktu itu saya di Kementerian Riset yang dibentuk tahun 1963 dan dibentuk oleh Bung Karno. Jadi saya jadi ikut-ikutan tahu.

Tahun 1976 itu, Direktur *UN Office for Science and Technology* dari New York datang ke pertemuan Bangkok dan mengetahui kalau Indonesia sudah mengerti akan ada *science conference* tingkat dunia tahun 1979. Kantor UN itu memang dibentuk untuk mempersiapkan konferensi *science for technology* untuk *developing countries*. Direktur itu sangat *impressed* (terkesan) dengan *statement* Indonesia yang sudah mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan konferensi dunia sehingga Negara-negara Asia bisa bersatu menyiapkan konferensi tersebut. Dia minta agar dibentuk satu tim untuk membahas persiapan Asia menghadapi *world conference* (konferensi dunia) tahun 1979 tersebut. Setelah itu terbentuk satu tim, *working group* (kelompok kerja), dan ditunjuk wakil-wakilnya. Karena ini terbentuk berdasarkan usul Indonesia, maka Indonesia lah yang diminta untuk mengetahui bidang itu. Ketua LIPI menunjuk saya menjadi ketua tim untuk *working group* guna membahas persiapan Asia menghadapi konferensi dunia 1979. Lalu muncul pemikiran untuk dikaitkan dengan isu perempuan yang juga harus maju. Misalnya tahun 1975, ada *world conference on women* dan dilanjutkan tahun 1985 untuk konferensi kedua.

Tahun 1976, usia saya 43 tahun. Saya mengetuai rapat persiapan konferensi itu. Saya katakan, karena semua *expert* (ahli) sudah ada, rapat bisa dilakukan lebih cepat. Saya perlu *rapportuer* yang *native speaker*, supaya pencatatannya bagus karena harus lapor di sidang. Ternyata, ada *volunteer* (relawan) dari Australia. Ada usulan yang berkembang, bahwa kita perlu mengikuti perkembangan dunia dan menyesuaikan diri. Saya lalu diminta bekerja di kantor UN. Disampaikan juga bahwa kita dari Asia harus mengikuti perkembangan, seperti mengikuti rapat di UNESCO tahun 1978, sebelum konferensi 1979. Saat ditawarkan kerja di UN, saya bilang tidak bisa karena status saya pegawai negeri, sebagai Kepala Biro Hubungan Internasional LIPI. Tapi UN bisa mengajukan permohonan kepada Pemerintah Indonesia. Saya masih segan berangkat karena orang tua saya baru pindah ke rumah saya; saya tidak mau meninggalkan mereka. Lalu ada persiapan *Pacific Science Association Intercongress* di Bali tahun 1977. Akhirnya, setelah konferensi di Bali ini, Ketua LIPI melepas saya, setelah negosiasi dengan pemerintah Indonesia disetujui; saya mulai bekerja di PBB pada April 1978.

Sejak itu, saya ikut mempersiapkan *world conference*. Setiap Sabtu, ada rapat Non Government Organisation (NGO), yang juga dihadiri NGO perempuan dari New York; saya banyak mendengarkan. Awalnya, saya belum tahu lalu saya mulai tertarik [isu perempuan]. Kelompok NGO sedang mempersiapkan resolusi untuk dimasukkan dalam konferensi. Lalu masuklah kelompok perempuan dalam *world conference* tersebut.

Kita membuat tim dan saya mewakili isu *science* dan teknologi dan mulai memasukkan [perspektif perempuan] di mana saya mulai tertarik pada tahun 1980. Saya mulai melakukan koordinasi dan mengusulkan agar *science* masuk di semua lini dan harus dikordinasi semua *office* di UN. Saya membuat studi tentang *UN efficiency in science and technology* (efisiensi PBB dalam IPTEK) dan sudah mulai mengkritik bahwa sebenarnya masing-masing *office* di UN jalan sendiri; UNESCO, ILO, UNIDO, UNFPA, berjalan sendiri. Lalu dibentuk *Office for Program Planning Coordination* (kantor untuk Koordinasi Rencana Kerja). Saya mengorganisir kantor ini tahun 1980-1982. Saya dipindah ke unit NGO dari kantor Sekjen untuk mengurus *participation for NGO* (keterlibatan organisasi

non pemerintah) untuk UN forum, tahun 1982-1983. Saya mulai melihat beberapa hal; yang bisa ikut bicara adalah negara maju yang punya uang. Saya bilang, jangan seperti itu; PBB harus mencari bantuan untuk NGO di negara berkembang agar mereka bisa ikut berpartisipasi. Syaratnya harus bermanfaat untuk kerja-kerja UN.

Baru setahun, saya dipindah ke Wina untuk mempersiapkan konferensi dunia perempuan ketiga, tahun 1983-1985; konferensi dunia ini dilakukan di Nairobi. Lalu saya masuk ke divisi *for the advancement*



Sjamsiah Ahmad

*of women*. Tugas saya, mengkaji dan menganalisa *UN decade for women* karena ada satu dekade antara 1974 sampai 1985. Saya membuat kuisioner dan kuisioner tersebut dikirim ke semua negara. Saya juga terlibat dalam survei dunia mengenai perempuan dalam pembangunan, *women in development*. Mengkaji situasi masa lalu (*the past*), merencanakan masa depan (*the future*) dan melihat survei dunia mengenai perempuan dalam ekonomi. Tema dari perempuan dan pembangunan itu adalah dampak krisis ekonomi terhadap perempuan. Itu adalah survei perempuan pertama tahun 1986.

### Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk penegakan hak-hak perempuan baik di Indonesia maupun di tingkat dunia?

Saya belajar dari konferensi. Tahun 1988, saya dipanggil pulang oleh Pemerintah Indonesia setelah 11 tahun di luar negeri. Saya menjadi asisten Menteri Urusan Wanita. Pada tahun 1995, UN mengadakan

konferensi dunia lagi di Beijing. Saya menyiapkan diri untuk konferensi ini. Sebenarnya kita diminta menjadi tuan rumah (host) dalam *world conference* itu, tapi belum mampu; level Asia Pasifik saja dulu, jangan dunia. Saya ditarik lagi ke LIPI. Saya sempat membuat rapat di Jakarta, mengundang *expert* di bidang *science*, teknologi dan gender. Saya juga menyusun pidato Ketua LIPI, yang isinya, "sekarang kita sedang berjuang untuk APEC; kalau tidak ada keadilan (*equality*), perempuan tidak bisa menjadi pemimpin (*leader*), sehingga penting, untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan, angka kematian ibu, yang tidak mungkin [dilakukan] tanpa ahli *science* dan teknologi yang mengerti masalah khusus perempuan dan punya perspektif gender. Kita butuh banyak masukan mengenai persoalan ini untuk APEC."

Selanjutnya saya diminta ke Komnas Perempuan oleh Ibu Saparinah Sadli. Waktu membuat Komnas ini, kita sering rapat di UI. Karena saya pegawai negeri yang pensiunnya belum diteken Pak Harto. Saya ini pensiunan bukan, pegawai negeri juga bukan.

### **Hambatan terbesar dalam penegakan hak-hak perempuan di tingkat nasional dan global menurut Ibu?**

*Mindset* (pemikiran) yang berarti *values* (nilai-nilai); *mindset* mempengaruhi *decision making* (pengambilan keputusan) dan *policy* (kebijakan). Perempuan harus ada di situ secara fisik; itu satu bagian. *Gender perspective* (perspektif gender) dan *recognition of women's human right* (penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia perempuan) harus ada dalam *mindset* setiap orang. Maka, saya tidak setuju [hanya] pemberdayaan perempuan, tapi harus perempuan dan laki-laki karena dua-duanya harus *empower* (berdaya) untuk tidak sekedar tahu tapi mengerti dan komit untuk mewujudkan keadilan di antara perempuan dan laki-laki. Statistik terpilah, seks atau gender, tidaklah cukup karena hanya memberitahu angka, tapi bukan analisisnya. Kajian dan analisis kenapa kesenjangan (*gap*) ini terjadi dan ada perlu dilakukan. Datanya kemudian diserahkan ke Pemda agar ada kebijakan *gender budgeting* (anggaran berperspektif gender).

### **Nyatanya sekedar gender disegregated data (data terpilah berdasarkan gender) kita juga masih lemah ya?**

Itu saja belum kita kerjakan. Saya sering *ngomong* kemana-kemana tentang *basic democratic statistics* (statistik demokratis dasar) adalah yang *sex disegregated* (terpilah berdasarkan jenis kelamin) dan berdasarkan usia; itu kita tidak punya. Harus ada uang yang dikeluarkan untuk itu dan Pusat Studi Wanita, Gender dan HAM harus dikembangkan. PSW harusnya menggerakkan dan mendorong Menteri Pemberdayaan Perempuan agar berperspektif gender. Pusat Studi Wanita harusnya mengkaji area masing-masing dan kerjasama dengan yang ada di mana-mana. PSW harus menjaga supaya data itu harus terpilah antara perempuan dan laki-laki di semua bidang, semua sektor dan tingkatan. Dimensinya harus horizontal dan vertikal. Semua fakultas harus ikut PSW untuk memperhatikan adanya *gap*. Itu peran PSW. Setelah ada data, mengapa ada data seperti itu? Lalu datang ke Bapedal dan Bapeda yang akan memasukkan dalam rencana pembangunan.

### **Menurut Ibu, apa masalah yang paling krusial dalam gerakan perempuan?**

Generasi muda. Mereka tidak tahu tentang sejarah dan perjuangan perempuan di Indonesia. Ini harus disosialisasikan di sekolah-sekolah. Saya diundang ke FISIP UI untuk (memberi materi) hak asasi perempuan dan politik di sana. Sejarah [gerakan perempuan] harus diperkenalkan. Saat itu, saya mengatakan, jangan bilang bahwa perempuan tidak tahu politik. Sudah lama perempuan *ngomong* banyak dan *clear* (jelas) [tentang politik]. [Yang mereka lakukan] itu adalah level tertinggi dalam politik. Waktu itu, mereka sudah menentang nuklir. Sayang, generasi muda kita, apalagi perempuan, tidak tahu apa-apa.

Sejarah itu sangat penting. Kita sampai di sini sekarang kenapa? Kita punya *gap* dan harus tahu di mana *gap*-nya. Kita harus mengatakan dan menganalisa *gap*-nya, baru kemudian membuat strategi untuk menghilangkan kendala. Kendala nomor satunya ada di kepala orang. Kita [bisa] membuat mereka berubah hanya kalau kita bisa meringankan kendala dan dampaknya. Kita sudah mengadopsi nilai-nilai universal, kemanusiaan (*humanity*). Bahaya jika anak-anak atau generasi muda tidak lagi mengetahui sejarah perjuangan perempuan dan bangsa kita yang sebenarnya sejarah yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Saya katakan [hal ini] kepada mereka dan mereka terbeleng-beleng. Pancasila malah lebih dulu dari pada *UN Charter*. Pancasila [diformulasikan pada] 1 Juni, sedangkan *UN Charter* pada 24 Oktober 1945. Sukarno sudah lebih dulu sadar dan sudah membuat Nasakom: bukan tidak percaya Tuhan, tapi sosialisme atau kerakyatan. Kita sudah punya Pancasila, sudah begitu hebat.

### **Bisa diceritakan proses dan sejarah CEDAW serta keterlibatan Ibu?**

Perempuan Indonesia sudah menjadi anggota *Commission on the Status of Women* yang membuat CEDAW tahun 1946. UN berdiri langsung membuat komisi *human rights* dan ECOSOC, tetapi perempuan, antara lain Eleanor Roosevelt, menuntut supaya ada komisi perempuan. Jadi dipaksa membuat *draft* dan *sub-commission* dari *HR commission* yang sudah berjalan sampai empat bulan. Karena mereka terus mendesak untuk menjadi komisi tersendiri, maka akhirnya dikabulkan menjadi *Commission on the Status of Women*. Ini sangat penting diketahui. Yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data dan mengusulkan pada pusat statistik untuk dilengkapi dengan masyarakat yang (berjenis kelamin) perempuan juga sehingga data mereka tersedia. Para Akademisi perempuan mulai mempelajari data tersebut dan mulai dibuat argumentasi sehingga ditemukan ada *mindset* yang diskriminatif sehingga perempuan tidak bisa berkembang. Mereka banyak bergerak karena UNESCO, WLO dan ILO sudah ada. Konvensi perempuan pertama tahun 1952 sebelum ECOSOC dan hak sipil politik adalah *political rights for women* (hak-hak politik perempuan). Diperjaya atau tidak, Indonesia meratifikasi. Tahun 1948, muncul Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan tahun 1949 muncul konvensi tentang prostitusi dan *trafficking*. Lalu, hak sipil-politik dan ekonomi pada tahun 1962 dan berlaku pada tahun 1966 karena hanya sedikit negara yang meratifikasinya.

### **Sejauh ini pelaksanaan CEDAW sejak diratifikasi sampai sekarang di Indonesia seperti apa?**

Sangat buruk; 25 tahun sudah sangat lama. Yang paling dasar saja, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan itu dasar sekali. Apalagi UU yang lain. Makanya, saya heran waktu

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan tujuh departemen yang sudah *committed* untuk *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender) tapi tidak termasuk Departemen Tenaga Kerja. Itu benar-benar status [yang buruk].

[Di kalangan anggota PBB sendiri, setelah terbentuk] *Commission on Women*, [lalu] mengumpulkan data terlebih dahulu dan baru tahun 1967 berhasil membuat *declaration on the elimination of all form of discrimination against women* (CEDAW). [Namun, butuh waktu yang panjang], karena konvensi dan deklarasi harus disetujui oleh Majelis Umum PBB. Sekarangpun masih sedikit perempuan di Majelis Umum. Tahun 1975 dibuat *world conference* dan akhirnya 1979, CEDAW selesai diadopsi Majelis Umum PBB dan 1980 dibuka untuk *signature* di Copenhagen. Indonesia langsung *teken* pada tahun 1980 dan membutuhkan empat tahun untuk ratifikasi karena [menunggu] di DPR. Itu hebatnya Mochtar Kusumaatmaja (Menteri Luar Negeri saat itu). Ia mengatakan bahwa deklarasi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Obligasi (kewajiban) dari meratifikasi adalah menyesuaikan dan memasukkan prinsip non diskriminasi ke konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah cara kita mengimplementasikannya.

### **Lalu bagaimana dengan pelaksanaannya?**

Setelah ada UU-nya, kemudian [fokus] implementasinya, misalnya, kesetaraan dalam pendidikan. Pelaksanaannya seperti apa, dan ini harus ada indikatornya. [sama-sama] masuk sekolah, ya, tapi tidak hanya kesempatan saja, sehingga pasal empat ayat 100, CEDAW, *temporary special measure*, perempuan harus dimampukan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, bukan hanya fisik dan intelektual tapi *social cultural* (sosial budaya) juga termasuk lingkungan dan orang tua. Biasanya, anak laki-laki yang diutamakan untuk bersekolah. Sesudah meratifikasi, ada obligasi bahwa definisi diskriminasi yang ada dalam pasal satu harus masuk ke dalam konstitusi perundang-undangan dan kita belum melaksanakannya. Lihat perda-perda yang ada dan undang-undang yang diskriminatif seperti UU Politik. Pasal dua CEDAW adalah *state obligation* (tanggungjawab negara), termasuk, *judicial system* (sistem peradilan) yang juga harus menjamin *equality* (keadilan).

### **Bagaimana dan sejauh mana implementasi produk hukum yang telah ada di Indonesia?**

UU adalah produk kebijakan nasional dan harus diimplementasikan di berbagai sektor. Sesudah UU PKDRT, lalu yang dilaksanakan siapa? Harus ada yang melaksanakan. Kalau aparat pemerintah, harus ada pengawasan. Di dalam keluarga, tidak dapat diawasi, tapi bisa dideteksi. Semua orang harus melaporkan bila tahu ada [kasus KDRT]; berarti masyarakat sudah melakukan. Perlu membuat sistem untuk polisi dalam menangani dan membawa [kasus] ke penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ini tugas Komnas Perempuan. Belum lagi, masyarakatnya: bagaimana kita membuat perempuan berani dan mau melapor. Sekarang karena sudah ada UU, sudah ada yang meningkat, tapi proses pengadilannya belum memberdayakan. Yang mengadu banyak, tapi 60-80 persen ditarik kembali kasusnya. Artinya, penegak hukum ini tidak memperlakukan mereka secara adil. Kalau diserahkan ke badan-badan penyelenggara negara saja, ini tidak akan berjalan, sehingga Komnas Perempuan membuat kemitraan dengan kelompok atau tokoh agama, pemuka adat, sehingga semua orang [bisa] mengontrol [pelaksanaan UU tersebut].

## Saur Tumiur Situmorang

### “Saya Tidak Ingin Memaksakan Diri Untuk Disebut Aktivistis Perempuan”

Oleh Nunung Qomariyah

Saur Tumiur Situmorang yang akrab dipanggil *Kak Saur* adalah satu dari lima belas Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2010-2014. Sebelum memutuskan bergabung di Komnas Perempuan, *Kak Saur* aktif di sejumlah organisasi sejak tahun 1988. Antara lain, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Lembaga Pertanian dan Teknologi Selaras Alam (PETRASA), Aliansi Organisasi Indonesia (AOI), Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Regional Sumatera, Jaringan Perempuan Pendamping Masyarakat Adat (JAPPAMA), *International NGO Forum for Indonesian Development* (INFID) dan *Center of Organization and Democracy Development* (CREDO). Untuk mengenal lebih dekat sosok dan pemikirannya, Nunung Qomariyah dari Redaksi Komnas Perempuan mewawancarainya di sela-sela kerja di Komnas Perempuan, Senin, 1 Februari 2010. Berikut petikannya.

#### Bagaimana perjalanan *Kak Saur* hingga memutuskan bekerja pada isu HAM dan Perempuan?

Setelah menyelesaikan studi di Semarang, saya pulang ke Tapanuli Utara. Di sana, saya melihat begitu banyak perempuan bekerja membangun jalan, mengangkat batu dan sebagainya. Ada perasaan getir melihat pemandangan itu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus perempuan yang melakukan pekerjaan “kasar,” padahal banyak laki-laki yang justru duduk mengobrol di warung sambil menyeruput kopi? Kondisi itu yang membuat saya termotivasi untuk bekerja di lembaga swadaya masyarakat.

Tahun 1988, saya bergabung dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Mulanya, saya pikir lembaga ini akan fokus pada persoalan perempuan. Namun, karena komunitas yang kami dampingi adalah petani, di mana kelompok petani juga memiliki banyak sekali isu yang penting, sehingga persoalan perempuan hilang dari prioritas saya. Lalu, saya memfokuskan pada isu HAM secara umum.

Salah satu kasus yang saya dampingi saat itu adalah kasus Indorayon. *Entry point* dari kasus ini adalah kerusakan lingkungan akibat sebuah industri yang kemudian berdampak pada masyarakat adat, khususnya perempuan karena limbah dari industri tersebut mengalir ke sungai di mana perempuan sering mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari.

Kasus ini menyeret sepuluh perempuan ke pengadilan karena dianggap merusak tanaman ekaliptus milik Indorayon. Belakangan, analisa saya mengatakan bahwa penangkapan kesepuluh perempuan ini merupakan strategi perusahaan dan pemerintah untuk melemahkan gerakan komunitas adat dalam melawan Indorayon.



Saur Tumiur Situmorang

Dalam adat Batak, perempuan tidak mempunyai hak atas tanah. Sementara, dalam kasus tersebut perempuan ikut berjuang untuk merebut kembali tanah-tanah mereka, bahkan berada di garis depan. Perjuangan para perempuan ini bisa saja sia-sia jika hakim memandang perempuan tidak mempunyai hak atas tanah sehingga tidak seharusnya ikut melakukan perebutan tanah dengan para suami mereka.

Dari kejadian itu, saya melihat betapa penting akses perempuan terhadap aset-aset produksi. Mereka sering mengatakan, “Kalau suami kami “bodoh,” masa’ kami ikut “bodoh.” Kami tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada Indorayon; suami-suami kami yang menyerahkannya. Oleh karena itu, kami merasa berhak mempertahankan tanah adat.”

Kasus itu mendorong kami melakukan advokasi pada dua level sekaligus, hukum nasional dan hukum adat. Pada level hukum nasional, kami ingin menekankan agar para perempuan ini juga mempunyai hak kepemilikan tanah, dan pada level hukum adat, kami menekankan pentingnya perempuan mendapatkan hak waris.

Konsep itu saya kembangkan di komunitas-komunitas dampingan, tentu tidak spesifik perempuan, tapi komunitas petani secara umum.

Selain itu, saya melihat banyak program pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat, namun perempuan tidak bisa mengakses dana bantuan tersebut

karena harus melalui para suami. Padahal tidak jarang dana tersebut justru dibuat foya-foya oleh para suami, meskipun tanggung jawab membayar hutang berada pada pundak perempuan juga. Kami membangun semacam *Credit Union* (CU) di mana perempuan (istri) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, apakah akan melakukan kredit atau tidak.

Pengalaman ini mengantar saya pada sebuah keputusan untuk terus menggeluti dunia HAM secara umum. Meskipun tidak spesifik perempuan, tidak bisa dipungkiri komunitas petani yang saya dampingi 60 persen adalah perempuan dengan segala persoalan yang mereka alami.

#### Apa catatan kritis dari perjuangan tersebut?

Ada hal yang sangat terkesan sekali, dan itu memberikan pelajaran bagi saya. Program kesetaraan gender yang kami lakukan ternyata tidak berjalan mulus. Di sebuah desa, kami menemukan perubahan 180 derajat pada masyarakat yang telah kami dampingi; ada pergantian posisi. Dulu laki-laki yang pergi menjadi buruh dan sebagainya; perempuan melakukan pekerjaan domestik. Dengan pelatihan itu, perempuan mulai keluar untuk mencari sumber ekonomi dan para laki-laki menggantikan pekerjaan perempuan yang ditinggalkan, mengurus anak dan melakukan pekerjaan domestik lainnya. Namun, justru di sela-sela pekerjaan domestik itu para laki-laki bermain judi. Kejadian tersebut tidak luput dari pemahaman mereka tentang kesetaraan gender. Mereka memahami kesetaraan gender adalah beralih peran bukan berbagi peran.

Pengalaman itu membuat saya tidak setuju melakukan pendampingan terhadap perempuan secara khusus. Kami lalu mengubah secara total metode yang telah kami lakukan: menggunakan gender lebih sebagai perspektif.

#### Sepertinya tidak ada kendala berarti dalam program-program yang dilakukan?

Sebetulnya, muncul kesulitan juga. Saya memang melakukan pendekatan berdasarkan kasus sehingga semua orang merasa berkepentingan, termasuk para tetua adat. Untuk program kesetaraan gender, relatif tidak ada kesulitan berarti. Kami mendekati para lelaki dengan pengembangan pertanian, sementara perempuan dengan pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan sanitasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pendekatan ini saya anggap gagal, setidaknya ini menurut penilaian saya.

Budaya menjadi salah satu kendala cukup berarti. Setidaknya peristiwa yang

saya alami bisa menggambarkan itu. Ada sebuah pengaduan di lembaga kami yang kebetulan diterima teman laki-laki yang ternyata tidak mempunyai latar belakang hukum. Akhirnya, tugas pendampingan untuk pengaduan tersebut saya yang melakukan.

Pada proses pendampingan tersebut saya datang ke desa itu. Karena dianggap akan memberikan pertolongan, masyarakat desa membuat penyambutan dengan memasak dan sebagainya. Ketika mereka tahu yang datang adalah saya, perempuan, seluruh acara penyambutan tidak jadi dilakukan.

Kesulitan-kesulitan seperti ini biasanya segera saya respon, sekaligus untuk memberikan pendidikan gender. Saya mengundang mereka datang ke kantor. *Nah, orang [laki-laki] yang mereka harapkan datang ketika itu, saya suruh untuk membuat minuman. Tentu mereka kaget; karena laki-laki tersebut ternyata hanya pembuat kopi.*

Mereka juga menganggap perempuan rendah karena tidak menikah. Kebetulan saya juga tidak menikah. Pada pertemuan berikutnya, saya meminta satu kawan yang hamil dan berumur lebih tua dari saya untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Sekali lagi mereka bertanya, "Kenapa orang tua disuruh memasak?" Saya menjawab, "kita bekerja memang harus berbagi peran. Ada yang melakukan pendampingan, ada yang membantu menyiapkan makanan dan sebagainya." Dari sini, mereka baru mulai terbuka bahwa laki-laki juga bisa membuat kopi, dan perempuan yang tidak menikah juga bisa melakukan banyak hal dan ternyata juga bisa dihargai dan dihormati.

#### ***Apa pembelajaran yang Kak Saur dapatkan untuk kerja-kerja yang telah dilakukan?***

Setidaknya saya bisa mengatakan bahwa perempuan, khususnya perempuan petani bisa dikategorikan dalam beberapa kelompok. Pertama, perempuan yang memang tidak berani sama sekali untuk berubah; kedua, perempuan yang berani berubah dan keluar dari nilai-nilai yang dianggap membelenggu, meskipun dengan hujatan dari keluarga, tetangga dan sebagainya. Kelompok kedua ini tidak jarang menyatakan mundur dan goyah karena tekanan yang mereka alami. Ketiga, perempuan yang konsisten untuk menularkan ide dan visi kami kepada generasi penerusnya, anak-anak mereka. Kelompok perempuan ini bisa dikategorikan sebagai pembaharu dan sudah mampu menjadi pengurus. Mereka juga lebih terbuka dan berani mentransformasi pengetahuan yang mereka miliki kepada orang lain.

Masyarakat dampingan kita adalah masyarakat Batak dengan sistem adat patirarkis; perempuan tidak punya hak waris dan hak atas tanah, tapi bertanggungjawab melakukan aktivitas pertanian. Ketika muncul industri, tanah mereka diambil pengusaha. Pendekatan para laki-laki adalah memanipulasi

hukum adat; akhirnya, tanah beralih kepemilikan pada perusahaan.

Ada perlawanan dari perempuan untuk mempertahankan tanahnya, sebaliknya laki-laki menjualnya. Lembaga kami mendampingi kelompok perempuan untuk mempertahankan tanah. Sebenarnya, mereka tidak perlu melakukan itu karena bukan pemilik. Tapi, ada hukum pertanahan yang menyebut, laki-laki dan perempuan punya hak atas tanah yang sama. Ini peluang untuk mengakses hak perempuan atas ketiadaan kebijakan. Kami juga memberikan penyadaran hukum, bahwa perempuan berhak mempertahankan haknya sebagai warga negara.

Ketika di persidangan, hakim menggunakan hukum adat dan menyatakan perempuan tidak berhak mempertahankan tanahnya. Kita [melawan dengan] hukum adat juga. Pemerintah menggunakan hukum adat yang melemahkan posisi perempuan dan menguatkan kedudukan pengusaha. Kita menggunakan hukum adat untuk melawan; kita menggunakan konsep keluarga: ada ayah, istri, dan anak. Dalam adat, ada semacam dalil, "Apapun yang dilemparkan [benih] di ladang, ketika tumbuh, akan menjadi miliknya." Dalam kasus dampingan ini, ada pengusaha yang menanam *ecaliptus* dan masyarakat memegang hukum adat bahwa "Hak saya menebang pohon itu." Perempuan bisa terbebas, dan tanah pun bisa kembali menjadi hak milik petani.

#### ***Mengapa memutuskan untuk bekerja di tingkat nasional dan bergabung dengan Komnas Perempuan?***

Secara jujur saya katakan, saya tidak begitu banyak mengetahui Komnas Perempuan, dibanding Komnas HAM. Jadi, lebih karena dorongan kawan-kawan. Sebetulnya jaringan perempuan di Sumatera Utara tidak begitu memberikan dukungan kepada saya. Mereka melihat, saya bukan seorang aktivis perempuan, tapi perempuan aktivis. Saya tidak tahu aktivis perempuan atau bukan, yang jelas selama ini lebih dari 60 persen perempuan petani saya dampingi untuk memperoleh hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai perempuan. Saya juga tidak mau memaksakan diri harus disebut sebagai aktivis perempuan.

#### ***Sejauh apa pengetahuan Anda tentang Komnas Perempuan dan kerja-kerja yang menjadi fokus perjuangan Komnas Perempuan?***

Paling tidak, sampai dengan November 2009 lalu sebelum saya terpilih menjadi salah satu anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2010-2014, saya melihat kehadiran Komnas Perempuan sangat dibutuhkan.

Kenyataan bahwa penduduk Indonesia mayoritas perempuan adalah sebagai bukti betapa pentingnya Komnas Perempuan. Meskipun perempuan telah mengenyam pendidikan tinggi, pendidikan gender dan sebagainya, kita masih melihat banyak perempuan yang termarginalkan, baik oleh rekan-rekan laki-laki, maupun oleh perempuan sendiri. Kedua, saya melihat fungsi pemantauan di Komnas Perempuan terlalu pasif. Saya mengatakan ini karena pengalaman saya ketika meminta salah seorang kawan Komnas Perempuan yang kebetulan melakukan kunjungan ke Medan untuk turut menjenguk tahanan perempuan tidak dikabulkan hanya karena tidak ada surat jalan. Inilah alasannya, kenapa saya sangat ingin masuk ke Sub-Komisi Pemantauan. Saya melihat mandat Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan sangat sempit.

Kawan-kawan di daerah mungkin paham betul cakupan mandat Komnas Perempuan sehingga setiap kasus yang ditangani kawan-kawan daerah dan mendapat respon cepat dari Komnas Perempuan menjadi kekuatan mereka.

Saya juga melihat, betapa banyaknya kerja-kerja yang dilakukan Komnas Perempuan untuk pemenuhan Hak Asasi Perempuan, seperti yang dipresentasikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Publik beberapa waktu lalu. Namun, sayangnya, tidak semua kegiatan tersebut diketahui dan diapresiasi oleh banyak pihak. Karenanya, di samping disampaikan kepada instansi terkait, kerja-kerja Komnas Perempuan perlu juga dipublikasikan termasuk kepada komunitas korban dan pendampingnya. Sehingga, apa yang menjadi konsen mereka sudah diangkat dan juga menjadi konsen Komnas Perempuan.

#### ***Program prioritas apa yang harus dilakukan dalam lima tahun ke depan?***

Sebagai sebuah mekanisme nasional penegakan hak asasi perempuan, Komnas Perempuan berkewajiban menjembatani *gap* pengetahuan di antara lembaga-lembaga negara sebagai pengambil kebijakan dan sekaligus pihak yang seharusnya memberikan hak-hak kepada warganya. Selain itu, Komnas Perempuan harus punya program untuk penguatan korban dan pendampingnya.

Kalau diminta menekankan prioritas, saya akan memilih isu petani karena basis saya memang di sana. Tentu ini akan menjadi *bias*. Makanya, saya selalu ikuti semua diskusi yang ada di Komnas Perempuan agar saya tidak terpaku dengan isu petani.

## Profil Singkat Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Masa Bakti 2010-2014

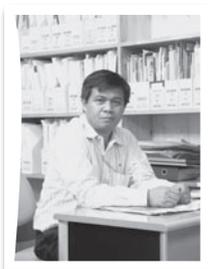
### Yuniyanti Chuzaifah



Bekerja di isu perempuan sejak tahun 1990, antara lain bergabung dengan Solidaritas Perempuan, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, Suara Ibu Peduli, Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia dll. Sejak tahun 2001 bergabung dengan lembaga internasional *Common Ground Indonesia*. Menjadi *Gender Advisor/Konsultan* untuk perguruan tinggi Islam. Menjadi *national board* untuk *International Center for Islam and Pluralism* (ICIP). Saat ini sedang menuntaskan program doktor di Amsterdam University bidang Antropologi tentang Jender dan Migrasi.

### Agustinus Supriyanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak 1994, juga sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Multikulturalisme. Peneliti dan pembicara untuk isu perlindungan buruh perempuan dan buruh migran di Indonesia dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, serta ahli bidang hukum internasional.



### Andy Yentriyani



Pengajar mata kuliah "Jender dalam Hubungan Internasional", Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sejak tahun 2000 menjadi Peneliti dan pengelola program di

Komnas Perempuan dan peneliti utama untuk program yang didanai oleh Norway Embassy. Menyelesaikan studinya di University of London, Gold Smith College di bidang Media and Komunikasi.

### Kunthi Tridewiyanti

Pengajar Hukum dan Gender di Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, Pengajar Antropologi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, mendirikan dan menjadi Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia (APPHGI).



### Sri Nurherwati (Ketua Pemulihan)



Aktif di LBH Semarang (1995), Direktur LRC – KJHAM – Jawa Tengah (1999), dan Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK – Jakarta (2006). Bergelut pada isu hukum khususnya Persoalan dan Dampak Korban KDRT serta Implikasi CEDAW bagi Implementasi UU PKDRT.

### Desti Murdjiana



Menjadi Direktur Eksekutif Perkumpulan PIKUL (2003 – 2007), tahun 2000-2007 membantu pendirian 6 *Women Crisis Center* (WCC) di 6 wilayah NTT, Program Manajer PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Yogyakarta (1994 – 1999) dan turut membidani kelahiran WCC Rifka Annisa. Sekarang aktif di Program Reparasi untuk *International Center for Transitional Justice* (ICTJ).

### Masruchah

Alumni IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (2004 – 2009), Wakil Sekjen jaringan nasional penanggulangan busung lapar (2005–2007). Masruchah aktif bekerja di isu hak-hak reproduksi perempuan, keterwakilan perempuan di lembaga publik, *gender budget*, dan kebijakan-kebijakan inkonstitusional.



### Arimbi Heroepoetri



Aktif bekerja untuk isu lingkungan, masyarakat adat, konsumen, perempuan dan globalisasi, ketika ia bekerja di WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) antara tahun 1988 – 2000. Koordinator dan pengajar pada mata kuliah Feminist Political Ecology di Kajian Wanita Universitas Indonesia sejak 2001. Direktur debtWATCH Indonesia (2000 – 2008).

### Husein Muhammad

Pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid Arjawinangun – Cirebon. Menjadi pendiri berbagai macam LSM, seperti RAHIMA (Jakarta), Fahmina (Cirebon), WCC Balqis, dan Yayasan Puan Amal Hayati (Jakarta). Sempat menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999 – 2004), selain menulis berbagai macam artikel mengenai Fiqh perempuan, Gender di Pesantren dan Pluralisme.



### Neng Dara Affiah

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama bidang Litbang (2005-2009) dan bidang Hukum dan Advokasi (2000-2005). Membidani lahirnya organisasi *Alimat*, sebuah organisasi konsorsium yang melakukan gerakan keluarga yang setara dan adil gender. Terlibat sebagai konsultan penelitian untuk negara-negara berbasis Muslim yang tergabung dalam *Women's Empowerment in Muslim Contexts* (WEMC) (2005–2009), pengajar "Pemikiran Sosial dalam Islam dan Sosiologi Agama" pada Fakultas Filsafat dan Agama, Universitas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta.. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI (2003- 2006). Menulis buku diantaranya *Muslimah Feminis: Penjelajahan Multi Identitas* (2009).





**Ninik Rahayu**

Pengajar di Fakultas Hukum selama 19 tahun tahun 1987-2006; Penggagas Integrasi mata kuliah Gender Hukum dan HAM sebagai Mata Kuliah mandiri dan wajib di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 1995; Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Jember 1992-2001; Penggagas dan ketua Lembaga Layanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Jember tahun 2004-2006; Pendiri dan ketua Forum Komunikasi Perempuan Politik di Kabupaten Jember tahun 2004.

Perempuan Politik di Kabupaten Jember tahun 2004.

**Tumbu Saraswati**

Pengacara praktek dan advokat sejak tahun 1985.. Pada tahun 1995 Dia adalah salah satu dari 7 advokat pendiri organisasi APIK dan sebagai Ketua Umum. Sebagai anggota DPR/MPR-RI pada tahun 2004-2009. Aktif bekerja untuk isu kebebasan informasi, perlindungan tenaga kerja, dan agraria. Dalam perjalanannya sebagai Wakil Ketua badan legislasi DPR, Dia memprioritaskan dibahasnya RUU PKDRT, Perlindungan Anak, Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjadi UU. Dia juga salah satu inisiator dan menjabat sebagai Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (2002). Menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975.



**Saur Tumiur Situmorang**



Bekerja di Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Siborong-borong, Sumatera Utara untuk isu petani dan masyarakat adat. Mendirikan beberapa lembaga advokasi dan perlindungan HAM, serta penguatan organisasi rakyat, antara lain: BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara), PETRASA (Lembaga Pertanian dan Teknologi Selaras alam), AOI (Aliansi Organisme Indonesia). Board di INFID (International NGO Forum for Indonesian Development) tahun 2002 s/d 2008. Sebelum masuk ke Komnas Perempuan menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif CREDO (Center for Organization and Democracy Development).

**Sylvana Maria Apituley**

Sejak tahun 1997 bergabung dengan gerakan social, khususnya gerakan perempuan serta mulai aktif memperjuangkan keadilan gender khususnya di komunitas Protestan dan kelompok lintas iman. Aktif di MADIA dan ikut mendirikan Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP pada tahun 1999. Mengajar Sejarah Kekristenan Indonesia dan Teologi Feminis dan memulai Pendidikan HAM di STT Jakarta sejak tahun 2004.



**Yustina Rostiawati**

Lulus studi magister dari Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana UI pada tahun 1998. Sejak tahun 1990-an telah menggeluti dan mengembangkan kajian berkaitan dengan isu perempuan di Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya. Tahun 1995 mengikuti konferensi Forum LSM (NGO Forum) di Konferensi Perempuan Internasional Ke-4 di Beijing. Menjadi tim pengajar di PSKW UI (Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana UI). Menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat bagi Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan, Konferensi Waligereja Indonesia.



**SUSUNAN ORGANISASI**

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2010-2014**

**PIMPINAN:**

Ketua : Yuniyanti Chuzaifah  
Wakil Ketua: Desti Murdjana  
Wakil Ketua: Masruchah

**KETUA DAN ANGGOTA SUB KOMISI DIVISI/GUGUS KERJA**

<p><b>Reformasi Hukum dan Kebijakan:</b> Ketua : Kunthi Tridewiyanti Anggota : Ninik Rahayu           : Tumbu Saraswati</p>	<p><b>Penelitian dan Pengembangan:</b> Ketua : Yustina Rostiawati Anggota: Husein Muhammad           : Neng Dara Affiah</p>	<p><b>Gugus Kerja Pekerja Migran:</b> Ketua : Agustinus Supriyanto Anggota : Sri Nurherwati           : Tumbu Saraswati</p>
<p><b>Pemantauan:</b> Ketua : Arimbi Heroepoetri Anggota: Saur Tumiur Situmorang           : Yustina Rostiawati</p>	<p><b>Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat:</b> Ketua : Andy Yentriyani Anggota: Neng Dara Affiah           : Arimbi Heroepoetri</p>	<p><b>Gugus Kerja Papua:</b> Ketua : Sylvana Maria Apituley Anggota: Agustinus Supriyanto           : Saur Tumiur Situmorang</p>
<p><b>Pemulihan:</b> Ketua : Sri Nurherwati Anggota: Ninik Rahayu           : Sylvana Maria Apituley</p>	<p><b>Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional:</b> Ketua : Husein Muhammad Anggota: Andy Yentriyani           : Kunthi Tridewiyanti</p>	

## Memantau Proses Seleksi

### Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2010-2014

Oleh **Nunung Qomariyah**

Masa bakti Komisi Paripurna atau Komisioner Komnas Perempuan periode 2007-2009 telah berakhir pada Desember 2009 lalu. Kini, memasuki tahun baru 2010, telah terpilih 15 Komisioner baru yang siap melanjutkan perjuangan Komnas Perempuan, menciptakan situasi kondusif untuk pemenuhan hak asasi perempuan. Para Komisioner ini dipilih melalui sebuah proses yang difasilitasi Tim Independen selama sembilan bulan (April-Desember 2009). Tulisan ini memaparkan bagaimana proses pemilihan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2010-2014 berlangsung.

#### Kenapa Harus Tim Independen?

Dalam Surat Keputusan Nomor 007/KAKTP-KC/Sk/III/2009 tentang Pembentukan Tim Independen untuk Pemilihan anggota Komisi Paripurna Periode Januari 2010-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Komnas Perempuan periode 2007-2009 Kamala Chandrakirana, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan anggota Komisi Paripurna perlu dilakukan secara independen, imparial, transparan, akuntabel dan memiliki integritas. Keputusan tersebut senada dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga Independen. "Untuk memastikan bahwa kerja-kerja Komnas Perempuan bersifat independen, maka anggota Komisi Paripurna yang dipilih juga harus melalui proses seleksi yang independen", papar Eni Soeprapto, mantan Ketua Tim Independen Pemilihan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2010-2014.

Pada tanggal 23 Maret 2009, Komnas Perempuan membentuk Tim Independen yang terdiri dari lima orang dengan satu ketua, sekretaris dan tiga anggota. Mereka adalah Eni Soeprapto, mantan anggota Komisi Paripurna Komnas HAM (Ketua Tim Independen); Tati Krisnawaty, mantan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan (Sekretaris); Achie Luhulima, pengajar dan peneliti senior LIPI (Anggota); Susanti Adi Nugroho, mantan Hakim Tinggi (Anggota); dan Rumadi, akademisi Universitas Islam Negeri Jakarta (Anggota). Sesuai dengan SK Pengangkatan, Tim Independen bekerja selama sembilan bulan (1 April-31 Desember 2009). Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Tim Independen dibantu oleh seorang sekretaris.

Langkah pertama yang dilakukan Tim Independen adalah membuat tata tertib (tatib). "Tata tertib itu sangat penting karena kita berlima berasal dari latar belakang yang berbeda", ungkap Eni. Tatib ini dijadikan panduan untuk melaksanakan kerja-kerja selanjutnya selama sembilan bulan.

#### Proses Pemilihan

Dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan telah tercantum dengan jelas tugas dan

tanggung jawab Tim Independen, sekaligus tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan seleksi calon Anggota Komisi Paripurna. Eni Soeprapto melihat tahapan seleksi yang telah disusun oleh Komnas Perempuan sangat bagus. "Bahkan saya bisa mengatakan ini bisa dijadikan model seleksi oleh lembaga-lembaga lain", paparnya.

Sebelum menentukan kriteria calon anggota Komisi Paripurna periode 2010-2014, Tim Independen melakukan konsultasi dengan pihak internal, yaitu para anggota dalam Komisi Paripurna 2007-2009 dan badan pekerja Komnas Perempuan.

Selain itu, pada tanggal 18-19 Mei 2009, Tim Independen juga melakukan konsultasi nasional dengan mitra Komnas Perempuan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komisi-komisi independen lain, lembaga negara, organisasi masyarakat dan sebagainya. Hasil konsultasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan kriteria umum dan khusus calon anggota Komisi Paripurna.

Pada tanggal 27 Juni 2009, Tim Independen mulai mengumumkan kepada publik tentang adanya pencalonan anggota Komisi Paripurna 2010-2014. Pengumuman ini dilakukan secara serentak melalui media massa, seperti media cetak, website, email, *mailing list* dan jejaring sosial. Hasilnya, Tim Independen bisa menjangkau sebanyak 160 pelamar dengan berbagai latar belakang. Delapan belas (18) di antaranya tidak memenuhi persyaratan. Dengan melakukan proses seleksi melalui *curriculum vitae*, makalah, latar belakang dan penguasaan isu HAM dan Hak Asasi Perempuan, terpilih 41 calon anggota Komisi Paripurna untuk mengikuti proses selanjutnya. Satu calon mengundurkan diri karena mengikuti pemilihan ketua pada sebuah organisasi lain.

Untuk menguji penguasaan isu HAM khususnya hak asasi perempuan serta komitmen dari keempat puluh calon anggota Komisi Paripurna, pada tanggal 13 Oktober 2009, Tim Independen menggelar dialog publik yang dihadiri LSM, lembaga-lembaga negara, komisi nasional independen, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, mahasiswa, akademisi dan para jurnalis.

Seleksi anggota Komisi Paripurna diakhiri dengan wawancara terpisah yang dilakukan oleh Tim Independen dan anggota Komisi Paripurna 2007-2009 yang tidak lagi mencalonkan diri. Pertanyaan yang diajukan Tim Independen meliputi empat hal, yaitu integritas, kemampuan calon, komitmen (waktu) dan penguasaan HAM.

Tugas terberat Tim Independen adalah merangkul seluruh proses seleksi dari awal hingga akhir untuk diserahkan kepada Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2007-2009. "Kami membuat peringkat dari angka 1-15. Peringkat yang kami buat sudah bisa berbicara kenapa si A di peringkat satu dan yang lain di peringkat dua dan sebagainya", jelas Eni Soeprapto.

#### Kewenangan Terbatas

Meski secara keseluruhan, proses seleksi anggota Komisi Paripurna 2010-2014 Komnas Perempuan berjalan dengan lancar. Tidak semua orang puas atas proses pemilihan tersebut. Sejumlah orang menilai tahapan seleksi yang sudah sangat bagus diterapkan justru berakhir dengan proses pemilihan yang kurang tepat. "Saya berharap Komnas Perempuan ke depan bisa memperbaiki sistem di internal, terutama soal pemilihan. Karena Komnas Perempuan ini lembaga publik maka semuanya harus akuntabel dan transparan", demikian harapan Eni Soeprapto.

Masih menurut Eni, untuk melakukan pemilihan yang independen, idealnya antara tim seleksi dengan tim eleksi berbeda. Tim seleksi fokus pada dua hal, yakni kompetensi dan integritas. Sedangkan tim eleksi bisa berdasarkan pertimbangan pluralitas, politis dan sebagainya.

Dalam konteks pemilihan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2010-2014 dengan mengacu pada SK pengangkatan, Tim Independen tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemilihan anggota Komisi Paripurna periode 2010-2014. "Kewenangan Tim Independen hanya sampai pada seleksi, tidak sampai pada ranah pemilihan. Jadi kami berhenti sampai dengan menyusun daftar akhir calon-calon yang terseleksi berdasarkan peringkat penilaian, dan yang jumlahnya memenuhi sekurang-kurangnya 30 untuk kemudian 15 diantaranya dipilih", ungkap Eni Soeprapto lagi.



## Jangan Lupakan Kekerasan-kekeraan itu!

Oleh Diah Irawaty

**Judul** : Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa  
**Penulis** : Kamala Chandrakirana, Ayu Ratih, Andy Yentriyani  
**Penerbit** : Komnas Perempuan, Jakarta, 2009  
**Halaman** : xiv + 247

Bangsa ini yang mudah diserang penyakit amnesia membuat banyak tragedi kekerasan beserta korban tumbal dalam proses membangun negara-bangsa Indonesia (*nation-state building*) tak sering jadi hitungan, baik dalam upaya pemenuhan hak-hak warga yang dikorbankan maupun dalam pembuatan berbagai kebijakan. Bangsa ini memang lebih suka “mengingat” para pahlawan. Patung-patung Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Pasangan Proklamator, di antara para pahlawan bangsa yang patungnya gagah dan abadi berdiri di banyak ruang publik. Sedangkan, pada para korban, bangsa ini lebih senang untuk melupakannya. Tak satupun patung-patung mereka dipahat dan dibangun. Sejarah seperti tidak adil pada mereka yang menjadi tumbal. Karena itu, sungguh penting membuat berbagai upaya untuk menjaga ingatan kita akan tragedi kekerasan beserta korbannya sebagai bagian dari upaya mendesak tanggungjawab atas negara bagi pemenuhan hak korban termasuk kebijakan demi tak terulangnya tragedi itu.

Sementara itu, anak-anak bangsa ini juga butuh sebuah “monumen” yang bisa membuat mereka selalu ingat dan paham, berbagai tragedi kekerasan yang mengiringi sejarah pembentukan negara-bangsa ini. Sisa dendam tak berkesudahan, lalu tradisi kekerasan yang berulang, tak hanya menuntut tumbal, tapi menyita orientasi kita untuk jadi bangsa penuh martabat yang menempatkan penghormatan atas kemanusiaan di atas segalanya. Dengan belajar dari upaya yang didokumentasikan buku ini, para anak bangsa akan selalu bisa membuat refleksi atas kejadian-kejadian pelanggaran HAM yang menimpa perempuan, sehingga tidak justru turut dalam pelanggaran-pelanggaran itu.

Buku *Mari Bersikap* merupakan suatu inisiatif penting yang berusaha “mendekonstruksi” kebiasaan amnesia historis pada tragedi kekerasan dan para korbannya, utamanya kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam kurun empat dekade. Di antara tragedi yang direkam buku ini adalah kekerasan terkait Tragedi G 30 S tahun 1965, konflik Poso, konflik Papua, konflik Aceh, Timor Timur, Ruteng-NTT, Tragedi Mei 1998 dan Tragedi Jamaah Ahmadiyah. Tentu saja, rekaman atas tragedi tersebut dalam buku ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting karena fokus spesifiknya pada kelompok perempuan korban. Mereka adalah warga yang paling akhir diperhatikan dan diingat, kalau bukan justru dilupakan sama sekali, kala terdapat pembicaraan tentang sebuah tragedi kekerasan, dan kebijakan setelahnya. Dalam Tragedi G 30 S, sekelompok

perempuan yang menjadi korban malah dimanipulasi menjadi pelaku tanpa adab sehingga layak dinistakan.

Buku ini berisi dokumentasi penting tentang perjalanan bangsa yang samar atau disamarkan. Proses pendokumentasian buku ini dilalui dengan langkah krusial, memberi ruang luas bagi para korban untuk bersuara. Kebiasaan sebagai korban harus dipecah, agar kebiasaan lain, kebiasaan terhadap korban bisa lebih efektif dilakukan. Suara korban tentang beratnya menjadi kelompok tumbal, termasuk rasa beratnya diabaikan negara dan penguasanya, adalah suara orisinal dan autentik, sebuah fakta yang tak layak diabaikan. Merekalah yang harusnya paling mengenal kepentingan dan kebutuhannya sebagai korban. Dengan membuka ruang bicara bagi para korban, proses penyusunan buku dokumentatif ini juga menjadi bagian krusial dari upaya pemulihan. Buku, memang tidak bisa hanya sekedar menjadi kumpulan tulisan, kompilasi kata; buku harus menjadi alat, membantu korban melakukan proses *healing*, atau membantu korban memperjuangkan hak-haknya.

Ulasan sejarah tentang ideologi sosial-politik tentang menjadi dan memperlakukan perempuan di negeri ini menjadi pondasi yang efektif dalam membaca dan memahami situasi perempuan yang ditumbalkan dengan perspektif kepentingan korban. Terutama, ulasan buku ini tentang ideologi politik *womanhood* dan *motherhood* ala Orde Baru yang tradisional dan moralis menuntun pemahaman kita mengapa mereka yang sejatinya adalah korban berbagai kekerasan—utamanya kekerasan seksual—justru dinistakan oleh penguasa negeri ini. Atau, mereka, perempuan-perempuan yang senyatanya “tidak langsung terlibat dalam pergolakan politik” justru harus menjadi target kekerasan sebagai upaya penundukan. Karena ada ideologi di balik penargetan dan pengabaian ini, maka upaya perubahan paradigma bernegara juga menjadi sangat penting untuk menghentikan penargetan perempuan sebagai korban dan pengabaian hak mereka sebagai tumbal.

Buku ini adalah alat komunikasi Komnas Perempuan tentang pembelajarannya selama 10 tahun. Yang paling penting dari buku ini pula, karena ini bagian dari dokumentasi upaya Komnas Perempuan sekitar 10 tahun dalam menuntut tanggung jawab negara, di satu sisi, dan membangun kesadaran warga, di sisi lain, terhadap berbagai pelanggaran HAM berat yang dialami perempuan, berbagai informasi dalam buku ini menjadi pelajaran berharga dalam merespon pelanggaran-perlanggaran HAM serupa di negeri ini. Nyatanya, memang masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan yang belum sepenuhnya tersentuh keinginan politik (*political will*) penguasa untuk penyelesaiannya. Karena itu, belajar dari buku ini, kita perlu melanjutkan tuntutan itu terus-menerus agar akhirnya negara benar-benar bisa melakukan tindakan pemenuhan hak-hak perempuan yang terlantar.

Buku ini juga penting secara internasional karena kontribusi telaah sejarah lewat pengalaman perempuan, paham peran dan posisi perempuan dalam wacana bangsa negara-bangsa dan upaya pemulihan hak dan tanggungjawab.

Dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi yang konprehensif, buku ini telah memulai ikhtiar dalam membangun monumen sejarah penting agar kita semua ingat selalu terhadap tragedi-tragedi, bisa belajar sepenuh hati, tidak mengulangnya, dan yang paling penting menyediakan ruang empati dan penghormatan pada mereka yang menjadi korban. Dengan buku ini, penguasa negara ini telah dibekali sebuah dokumen penting untuk melangkah lebih konkrit dalam pemenuhan hak-hak korban. Jika tidak ada sikap nyata, buku ini belum memberi manfaat maksimal.

Akhirnya, pada kekerasan, kita tak lagi boleh bisu. Pada para korban, kita tak lagi bisa diam. Secepatnyalah, bersatu, bersuara, dan mengambil sikap! negara ini adalah negara beradab, negara kemanusiaan yang menempatkan mereka yang menjadi korban setara dengan para pahlawan.

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Komnas Perempuan dalam penegakan hak-hak perempuan Indonesia. Meski sudah banyak hal penting dicapai Komnas Perempuan, pekerjaan rumah juga masih banyak menunggu untuk diselesaikan. Dengan Komisi Paripurna 2010-2014, masyarakat berharap kinerja Komnas Perempuan akan lebih baik. Berikut harapan, kritik dan masukan perwakilan masyarakat terhadap Komnas Perempuan dan Komisi Paripurna yang dikompilasi dari wawancara yang dilakukan Diah Irawaty dan Nunung Qomariyah.

## Komnas Perempuan dan Komisi Paripurna 2010-2014 di Mata Masyarakat

**Ali Akbar, HRWG, Jakarta**

Komisioner sekarang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing. Ada ahli feminisme, perempuan, anak, dan buruh migran. Saatnya komisioner melihat advokasi dalam tingkatan lobi terhadap lembaga Negara lain. Komnas Perempuan harus mengambil inisiatif untuk melaksanakan rekomendasi komite internasional seperti CEDAW, CAT, dan CAD. Keberadaan Komnas Perempuan sangat penting untuk membuktikan bahwa Negara meyakini pentingnya lembaga khusus yang fokus pada isu perempuan. Hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.



**AD Eridani, Rahima, Jakarta**

Komposisi komisioner sekarang sudah bagus; ada aktivis, akademisi, kelompok agama, Muslim dan non-Muslim. Namun, belum ada keterwakilan kelompok minoritas. Juga, kurang ada orang yang dekat dengan pemerintah. Tidak seperti periode sebelumnya, ada, misalnya Ibu Deliana dan Sjamsiah Ahmad. Komnas Perempuan terlibat dalam pembentukan Alimat, jaringan berbagai unsur yang *concern* pada hukum keluarga berperspektif gender. Inisiatif ini harus diteruskan. Sebagai masukan, hendaknya jaringan dengan NGO lebih dikuatkan untuk mengawal rancangan undang-undang yang berperspektif perempuan.



**Endang Cahyanti, Rumah Kita, Jakarta**



Peran Komnas Perempuan dalam agenda gerakan perempuan harus diteruskan, khususnya dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan di lapangan. Bila ada kasus kekerasan, harus ada langkah lanjut, terutama untuk korban, tidak hanya didata dan didokumentasikan. Komnas Perempuan perlu melakukan sosialisasi ke bawah tentang keberadaan dan programnya, misalnya bekerjasama

dengan PKK. Komnas Perempuan perlu turun tangan ke masyarakat karena banyak yang tidak tahu persoalan yang berkembang, seperti nikah siri. Penguatan kerjasama dan jaringan perlu menjadi fokus Komnas Perempuan.

**Norma Manalu, RPUK, Banda Aceh**

Komnas Perempuan sebagai komisi independen bentuk pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan hasil pemantauan kepada pemerintah untuk mendukung perubahan kondisi perempuan. Status sebagai institusi negara juga strategis; suara yang ingin disampaikan CSO atau LSM kepada pemerintah



dapat disampaikan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sudah menjadi bagian integral gerakan perempuan Indonesia dengan membangun dukungan dan kerja sama dengan jaringan perempuan daerah dalam penegakan hak perempuan. Sebagai masukan, perlu diskusi tentang wilayah dan isu prioritas dalam melakukan advokasi. Walaupun persoalan perempuan cenderung seragam, kondisi wilayah sering menjadi faktor yang mempersulit gerakan perempuan. Untuk komisioner baru, jangan sampai karena berada dalam mekanisme yang sulit, membuat mereka mandul dalam memperkuat kerja-kerja penegakan hak perempuan.

**Salamun Ali Mafaz, Moderat Muslim, Jakarta**

Peran penting Komnas Perempuan terkait adanya payung hukum bagi persoalan perempuan di Indonesia dan adanya tindakan yang lebih terarah dalam penanganan masalah ini. Banyak undang-undang atau kebijakan yang kurang dipahami masyarakat di daerah tertinggal yang perlu disosialisasikan. Komnas Perempuan perlu terus melakukan pembelaan terhadap persoalan perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan perlu turun langsung melakukan konsolidasi dengan lembaga-lembaga di daerah.



**Ifa, WCC Jombang, Jombang Jawa Timur**



Kerja Komnas Perempuan sudah cukup bagus dilihat dari hubungan intensnya dengan jaringan di Forum Belajar. Jika Komnas Perempuan ingin menggabungkan NGO dan pemerintah dalam Forum Belajar, perlu dipastikan keduanya mempunyai persepsi sama. Untuk level kebijakan, meski Komnas Perempuan sudah berupaya, di daerah dampaknya belum terasa. Komnas Perempuan masih *segmented*. Idealnya, Komnas Perempuan mengetahui kondisi perempuan di tiap daerah karena beda daerah, beda permasalahan. Semoga, Komisi Paripurna 2010-2014 lebih bisa melihat persoalan perempuan di seluruh Indonesia.

**Nisa, Wahid Institute, Jakarta**



Komnas Perempuan sudah sangat baik dalam meng-*update* dan mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan serta menyusun laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai "lembaga negara," Komnas Perempuan berbeda dengan lembaga negara lain; Komnas Perempuan mempunyai perspektif terhadap korban. Saya harap, Komnas Perempuan punya wewenang lebih

luas, tidak terbatas memantau dan melaporkan, tapi boleh mendampingi korban hingga ke pengadilan dan memediasi pertemuan antara korban dengan pihak-pihak terkait. Yang juga penting, kantor Komnas Perempuan bisa terletak sejajar dengan kantor Komnas HAM. Posisi ini menunjukkan apakah Komnas Perempuan dan isu perempuan masih tersubordinasi isu-isu lain.

**Renaldi Damanik, Pendeta, Poso**



Kerja Komnas Perempuan sudah sangat maskimal, sudah meng-cover masalah perempuan di daerah. Komnas Perempuan sudah sangat baik melibatkan kami di daerah dalam penyusunan laporan kekerasan terhadap perempuan yang memuat data-data hasil investigasi yang sangat bagus. Dampak kerja Komnas Perempuan di Poso di antaranya, perempuan dan anak sudah mulai *aware*, semakin paham UU PKDRT, mulai berani melapor, dan aktif meminta email atau alamat Komnas Perempuan. Komisi Paripurna baru diharapkan semakin melibatkan laki-laki yang punya perhatian terhadap persoalan perempuan.

Saya tidak setuju Komnas Perempuan dihapus atau dilebur. Kerja Komnas Perempuan itu spesifik, untuk memastikan perempuan Indonesia menerima haknya sebagaimana mestinya.

**Farha Ciciek, Aktivistis Perempuan, Jember**

Harapan komunitas agama, Komnas Perempuan bisa menjadi institusi populis, memperhatikan aspirasi dan cara pandang kelompok agama. Simbolisasi, politisasi, dan fundamentalisme agama mulai menguat, baik di level masyarakat maupun negara. Respon Komnas Perempuan terhadap isu tersebut sangat baik. Representasi keterlibatan jaringan perlu diintensifkan. Regenerasi di daerah juga harus berjalan untuk merengkuh lebih banyak orang lokal karena kerja Komnas Perempuan adalah kerja jangka panjang. Perlu monitoring dan evaluasi terhadap proses regenerasi itu. Sebagai "lembaga semi negara", Komnas Perempuan perlu bekerjasama dengan pemerintah tanpa melupakan komunitas di bawah yang diperjuangkannya.



Saya tidak setuju Komnas Perempuan dilebur dengan lembaga lain. Perempuan masih perlu *affirmative action*. Jika dilebur, dikhawatirkan independensi Komnas Perempuan hilang. Komnas Perempuan perlu lebih efisien dalam manajemen; kerja Komnas Perempuan bisa dievaluasi secara objektif dan transparan oleh publik. Hasil kerja Mbak Nana (Kamala Chandrakirana) dan kawan-kawan menjadi capaian penting, sebagai modal teman-teman dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan.

**Suster Eustochia, Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), Flores**

Tiga tahun lalu, kinerja Komnas Perempuan sangat bagus dilihat dari relasinya yang sangat baik dengan mitra, aparat penegak hukum dan sebagainya. Surat-surat dukungan yang kami minta cepat ditanggapi. Tiga tahun terakhir, ada kelambanan Komnas Perempuan untuk memberikan surat dukungan itu. Mungkin terjadi koordinasi yang terputus antara komisioner satu dengan lainnya. Kami berharap komisioner satu dengan lainnya, juga badan pekerja lebih bisa bekerjasama demi kepentingan Komnas Perempuan dan korban.



Saya tidak sepakat Komnas Perempuan dilebur dengan lembaga negara manapun. Karakter kerja Komnas Perempuan berbeda dengan lembaga negara lain, termasuk Komnas HAM dan Komnas Anak. Pengalaman perempuan berbeda dengan pengalaman laki-laki. Karena itu, mereka yang bekerja untuk Komnas Perempuan adalah orang-orang yang peduli terhadap perempuan, khususnya korban.

## Dampak Pembangunan terhadap Perempuan Marginal

Oleh Nunung Qomariyah

*"Dulu Pantai Cermin menjadi sumber lahan mata pencaharian bagi nelayan; dari hutan bakau mereka bisa membuat sekeh untuk atap, kayu bakar; laut menjadi sumber kepiting dan udang.*

*Sepanjang bibir pantai menjadi pariwisata murah bagi masyarakat. Mereka bisa menyewakan tikar dan sebagainya. Perempuan di Pantai Cermin melakukan aktifitas domestik, termasuk mengurus anaknya, sekaligus menjaga lapaknya. Hasilnya, mereka bisa menyekolahkan anak dan makan berkecukupan."*

**(Lili Noviani Batara dari Bina Desa, Jakarta)**



seksual, dengan "toel-toel atau dicolek" misalnya.

Lebih lanjut, Khalisa Khalid menunjukkan kondisi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit juga tidak lebih baik. Para buruh perempuan harian lepas biasanya ditempatkan di wilayah-wilayah yang tidak membutuhkan tenaga besar; misalnya tempat penyemaian. Namun, justru di situlah banyak terdapat racun-racun dari pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan.

Hal lain yang diungkapkan adalah upah buruh perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Pembayaran upah juga tidak diberikan secara langsung. Banyak kasus di mana upah para perempuan justru diberikan kepada suami mereka. Padahal roda kehidupan keluarga disandarkan pada pundak perempuan.

Bagi perempuan yang tidak menjadi buruh, mereka memilih untuk menjadi 'brondol' sawit. "Brondol sawit adalah pekerjaan memungut buah sawit yang jatuh" papar Khalisa. Uang yang dihasilkan dari pekerjaan brondol bisa mencapai dua juta perbulan. Sayangnya pekerjaan yang sebetulnya menguntungkan perusahaan ini kerap dianggap pencurian. Padahal buah sawit yang jatuh jika tidak dibersihkan justru akan merusak pohon sawit yang lain.

Kasus-kasus di atas tidak hanya membuka mata kita tentang bagaimana perempuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi melakukan banyak cara untuk tetap bertahan dan mempertahankan hidup dan keluarganya. Inisiatif yang mereka lakukan mungkin tidak terlihat heroik di tengah kemiskinan dan keserba-kekurangan. Apa daya, globalisasi kebijakan neoliberal yang dipasang lewat jebakan hutang negara telah menghilangkan fungsi negara itu sendiri. Semua berjalan dalam mekanisme pasar, non subsidi dan seminimal mungkin negara hadir. Lalu, tanpa negara, atau ketika negara bersekongkol dengan kekuatan modal, pada siapa orang-orang yang lemah bersandar selain pada diri sendiri? Sebelum terlanjur, negara seharusnya segera berbuat!

Kondisi harmonis itu kini tinggal kenangan. Atas nama pembangunan, pada tahun 2001, investor asal Malaysia diperkenankan menguasai 27 KM dari 95 KM garis pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagal, Sumatera Utara. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan investor menyulap pantai menjadi resor pariwisata. Pantai yang dulunya menjadi hiburan gratis bagi masyarakat sekitar mendadak menjadi eksklusif dan hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit.

Kedatangan investor juga telah mematikan sumber penghidupan penduduk. Sejak saat itu, para perempuan tidak lagi bebas menjual barang dagangannya kepada para pengunjung pantai. Untuk bisa berjualan di wilayah resor, para pedagang harus rela mengeluarkan sejumlah uang kepada petugas keamanan. Tentu ini pilihan sulit bagi mereka. Bermain kucing-kucingan dengan keamanan menjadi strategi yang mereka lakukan untuk terus bisa berjualan ala kadarnya.

Akibatnya, penghasilan mereka terus menurun. Tak pelak banyak dari pedagang yang memutuskan untuk berhenti menyekolahkan anak mereka. Untuk tetap menjaga kelangsungan hidup, tidak jarang para perempuan akhirnya memutuskan keluar desa menjadi pekerja rumah tangga di kota-kota besar atau menjadi buruh migran.

Tidak sampai di situ; kondisi tersebut juga menimbulkan terjadinya gesekan antar satu pedagang dengan lainnya, sebuah kecemburuan yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagi para pedagang yang mampu membayar "tiket" masuk ke dalam resor akan saling bersaing untuk merebut pembeli. Akibatnya, terjadi ketegangan di antara sesama warga, kawan dan pedagang.

Situasi di atas diungkapkan Lili Noviani Batara dari Bina Desa dalam diskusi Forum Belajar Internal (FBI) yang diselenggarakan Komnas Perempuan melalui Divisi Pendidikan dan Litbang di Komnas Perempuan, 19 November 2009. Seperti disampaikan Neng Dara Affiah, FBI adalah wadah bagi Komnas Perempuan dan jaringan untuk memperkuat pengetahuan analisa dalam melihat persoalan perempuan, sehingga bisa menghasilkan terobosan dan strategi baru dalam melakukan advokasi. Kali ini topik yang diangkat adalah "Inisiatif Perempuan Petani, Nelayan, Perkebunan dalam Melawan Pemiskinan Perempuan." Dua narasumber dalam

diskusi tersebut adalah Lili Noviani Batara dan Khalisa Khalid dari Walhi.

Tidak bisa dipungkiri, hegemoni nalar pembangunan yang menghantui dunia semenjak berakhirnya perang dunia kedua telah mengubah drastis tatanan ekonomi dan bermasyarakat penduduk dunia. Terlebih, nalar pembangunan tersebut disokong penuh oleh mesin neoliberal yang canggih: IMF, WTO dan Bank Dunia. Hasilnya, "prestasi" Indonesia bisa dilihat dari munculnya kebijakan revolusi hijau, privatisasi (swastanisasi) perusahaan negara, deregulasi atau penyerahan pada mekanisme pasar, liberalisasi investasi asing dan seterusnya. Perlahan namun pasti, kebijakan tersebut tak pelak memberikan racun yang manis bagi dunia ketiga.

Alih-alih kebijakan neoliberal pembangunan memberikan kemakmuran, seperti kisah dari Pantai Cermin, pembangunan dengan sukses mencabut domain kerja para perempuan miskin digantikan dengan mesin, digantikan dengan modal besar, dsb. Tak pelak para perempuanlah yang menjadi korban bertubi dalam praktik penyingkiran ekonomi ini.

Tentu kita masih ingat bagaimana revolusi hijau telah merampas pekerjaan perempuan di sawah atas nama pembangunan dan swasembada. Cerita tentang perempuan di perkebunan seperti yang dipaparkan Khalisa Khalid menjadi contoh lain yang relevan. Terlebih, Khalisa menunjukkan, perempuan-perempuan itu secara terus-menerus dikondisikan untuk bekerja secara turun-menurun menjadi buruh perkebunan, baik buruh perkebunan teh ataupun buruh perkebunan kelapa sawit.

Sebagai buruh pemetik teh tidak ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah kondisi dimana sistem gaji berdasar pada berat teh yang didapat pada hari itu. Bagi Khalisa Khalid, seberat apapun kerja perempuan memetik teh dengan kondisi perkebunan yang licin, curam dan sebagainya tentu hasilnya tidak sebanding dengan yang dihasilkan oleh laki-laki. Buruh perempuan juga mempunyai kerentanan lain, berhadapan dengan mandor-mandor perkebunan yang seringkali melakukan pelecehan

## Perayaan Sepuluh Tahun Komnas Perempuan Memperluas Dukungan bagi Korban, Menggugah Tanggungjawab Negara

Oleh Nunung Qomariyah

Senin, 30 November 2009 menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi Komnas Perempuan. Ratusan orang memenuhi ruang auditorium gedung BPPT, Jakarta, dengan pakaian batik dan pernik lain layaknya pada sebuah acara resmi. Mereka bukan hanya pejabat negara, juga para perempuan korban yang selama ini didampingi dan menjadi mitra Komnas Perempuan. Di antara pejabat negara yang hadir saat itu adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koperasi dan UKM, mantan Presiden B.J.Habibie, Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman dan masih banyak lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri juga secara khusus hadir di sana. Mereka adalah para tamu undangan Komnas Perempuan pada acara "Puncak Perayaan Sepuluh Tahun Komnas Perempuan."



Dok. Komnas Perempuan.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia, 23 perempuan pembela HAM dari 15 Negara di Asia, Timur Tengah, Australia, Afrika dan Amerika serta perwakilan LSM, pekerja seni, pendidik, komunitas korban dan juga pendampingnya.

Puncak perayaan 10 tahun Komnas Perempuan diisi dengan peluncuran buku "Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa". Peluncuran buku ini menjadi bagian dari serangkaian acara puncak perayaan 10 tahun kerja Komnas Perempuan selama dua hari, 29-30 November 2009. Buku ini merupakan dokumentasi fakta tentang berbagai pelanggaran HAM berat yang dialami perempuan selama kurun empat dasawarsa sejak 1965. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan dari Peristiwa 1965, Tragedi Mei 1998, Timor Timur, Aceh, Papua, Ruteng Nusa Tenggara Timur, Maluku, Poso, dan kasus yang menimpa Jamaah Ahmadiyah.

Dalam pidato pembuka, Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan saat itu, berharap, buku ini bisa menjadi sebuah landasan bagi penyikapan nasional oleh bangsa, negara dan perempuan Indonesia, untuk memastikan pertanggungjawaban kita terhadap pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi atas nama Indonesia. Nyatanya, memang hingga hari ini masih banyak perempuan korban kekerasan masa lalu yang belum menikmati haknya secara utuh, semisal hak untuk bebas dari stigma, hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai dan hak-hak lainnya. Terlebih, hak untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pelanggaran HAM yang mereka alami.

### Janji Presiden

Pada pembukaan pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi atas kerja keras Komnas Perempuan selama 10 tahun. "Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komnas Perempuan yang tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa dan terus gigih memperjuangkan hak-hak perempuan", ungkapnya. Presiden berharap, dengan membaca buku "Mari Bersikap" ini publik dapat mengetahui pelanggaran HAM masa lalu, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus memperlakukan secara adil pihak-pihak yang mengalami pelanggaran HAM di masa lalu.

Di akhir pidatonya, Presiden mengutip pernyataan Desmond Tutu, "No future without forgiveness;" kita melangkah ke depan tidak boleh dengan dendam, dengan luka yang berkepanjangan. Namun demikian, Presiden menekankan bahwa masa lalu tidak boleh dilupakan sehingga yang menjadi korban harus diberikan keadilan di masa kini dan masa depan. Kasus-kasus pelanggaran HAM serupa juga tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang.

### Suara Perempuan Korban

Setidaknya lebih dari delapan puluh perempuan korban kekerasan hadir dalam acara tersebut, baik korban akibat konflik bersenjata, korban diskriminasi agama, korban konspirasi politik, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang lainnya. Mereka hadir dan berkumpul untuk saling menguatkan dan meminta pertanggungjawaban negara lewat komitmen yang disampaikan pemerintah melalui Presiden.

Beragam reaksi disampaikan perempuan korban terhadap pernyataan Presiden. "Pidato Presiden sangat baik; semoga tidak sekedar retorika," ungkap salah seorang perempuan korban 1965 asal Yogyakarta yang

telah dihukum penjara lebih dari 14 tahun. Korban lain asal Solo yang suaminya hilang pada peristiwa Mei 1998 memberikan pendapat sama. Dia berharap, kedatangan Presiden dalam puncak perayaan sepuluh tahun Komnas Perempuan tidak berbalik mengecewakan. "Saya kecewa dengan presiden-presiden sebelumnya; saya berharap apa yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya bualan, tapi benar-benar bisa terwujud," ungkapnya penuh dengan harap.

Selain peluncuran buku, masih di tempat yang sama, pada tanggal 29 November 2009 (pukul 09.00-17.00 WIB) dilakukan diskusi paralel dengan enam tema. Keenam tema ini dipilih sebagai pembuka untuk memahami secara lebih mendalam

persoalan yang diangkat dalam buku "Kita Bersikap, Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa".

Enam tema tersebut adalah, pertama, Pengalaman Pembuatan Video Dokumenter Putih Abu-Abu oleh Anak-anak SMA tentang Perempuan Korban 1965, kedua, Membangun Gerakan untuk Berhenti Menyalahkan Korban, ketiga, Memahami Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Masa Lalu, keempat, Mengatasi Kesenjangan dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berbasis Gender: Kekerasan Domestik & Politik, kelima, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Militarisme, Globalisasi Ekonomi dan Diskriminasi Rasial: Kasus Papua, dan, keenam, Keberlanjutan Aktivisme (*Sustaining Activism*).

Tidak kurang dari 350 peserta hadir untuk terlibat secara aktif dalam seluruh diskusi paralel tersebut. Mereka mewakili mahasiswa, pelajar, pendidik (guru dan dosen), komunitas korban dan pendamping, LSM, pemerintah, ormas, akademisi dan para perempuan pembela HAM dari 15 negara itu.

### Dukungan Warga Bangsa

Meski beberapa korban pelanggaran HAM masa lalu pesimis atas janji Presiden, namun dukungan dari warga bangsa menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi mereka. Dengan kemampuan dan caranya masing-masing, para warga bangsa dari berbagai kelompok seperti akademisi, pendidik, pekerja kreatif, mahasiswa, pengusaha, praktisi media, profesional dan pengusaha berkomitmen melakukan gerakan mari bicara kebenaran. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengajak seluruh warga bangsa berani memecah kebisuan tentang kekerasan yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan bangsa Indonesia. Sebut saja Sahala Manullang seorang guru SMU di Jakarta, berkomitmen untuk memasukkan sejarah pengalaman kekerasan perempuan pada materi ajar dan ekstrakurikuler. Nia Dinata, seorang pekerja seni juga mengungkapkan bahwa ia akan terus-menerus berbicara mengenai perjuangan perempuan, dan mengangkat film yang lebih berperpektif gender.

### Perayaan Aktivisme

Pada 29 November pukul 19.00-21.30 WIB digelar sebuah perayaan aktivisme yang dibungkus dengan pagelaran budaya. Acara ini bertujuan memberikan penghormatan kepada seluruh aktivis yang telah bekerja keras menciptakan situasi yang kondusif bagi korban, sehingga korban bersedia bicara dan berani mengungkap pengalaman pelanggaran HAM yang mereka alami.

Pengalaman perempuan korban kekerasan sangat penting untuk membuka sejarah kelam masa lalu. Sebagai sebuah negara-bangsa yang masih terus mencari jati diri, pengalaman kekerasan perempuan perlu menjadi pengetahuan banyak pihak agar kejadian serupa --pelanggaran HAM yang keji dan kejam-- tidak terulang lagi.

Perayaan aktivisme ini dibuka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar. Dalam sambutannya, Linda mengatakan, peran masyarakat dan seluruh komponen bangsa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan adanya kekerasan mengingat masih banyak korban yang belum mampu menyuarakan penderitaannya

Sebagai upaya untuk mempererat solidaritas dan perjuangan seluruh perempuan Pembela HAM, Komnas Perempuan menyematkan "selendang solidaritas" kepada seluruh aktivis perempuan pembela HAM yang hadir pada malam itu. Ratusan selendang yang dibuat secara khusus oleh Perempuan Perhimpunan Indonesia Tioghoa (Pinti) merupakan bentuk dukungan nyata agar para perempuan Pembela HAM di seluruh dunia tetap bergandengan tangan untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan.

## LPJP: Menegaskan Prinsip Akuntabilitas Komnas Perempuan

Oleh Diah Irawaty



Dok. Komnas Perempuan.

Laporan Pertanggungjawaban Publik (LPJP) yang diselenggarakan Komnas Perempuan (KP) pada 9 Desember 2009 mempresentasikan gambaran umum tentang akuntabilitas Komnas Perempuan yang disampaikan oleh Ketua KP, Kamala Candrakirana. Selain itu, LPJP ini juga memaparkan capaian-capaian dan kendala-kendala yang dihadapi Komnas Perempuan selama kurun tiga tahun, 2007-2009. Agenda lainnya adalah mendengar respon publik terhadap kegiatan-kegiatan Komnas Perempuan sebagai masukan untuk agenda dan program Komnas Perempuan ke depan. Tanggapan dari komisioner yang hadir pada hari itu, juga tanggapan dari beberapa penanggap juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan LPJP tersebut.

Kamala Candrakirana dalam penjelasannya tentang Akuntabilitas Komnas Perempuan sebagai komisi nasional menekankan, salah satu cara dalam mencapai akuntabilitas tersebut adalah dengan mengkomunikasikan kepada publik dengan berbagai cara, seperti dialog publik ini, tentang hasil-hasil kerja dan proses kerja KP kepada para pemangku kepentingan. Dengan landasan konteks sejarah lahirnya KP sebagai sebuah lembaga publik yang pembentukannya bersumber pada respon Presiden terhadap desakan masyarakat, dan dari kepemimpinan gerakan perempuan, KP selalu mencari jalan untuk saling berbagi pengalaman, meminta pendapat dan masukan dan mengkomunikasikan capaian-capaian dan tantangan-tantangan dengan masyarakat luas. Kamala menegaskan, mekanisme pertanggungjawaban publik KP ini merupakan wujud komitmen KP pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai sebuah lembaga publik. Konsekuensi dari mekanisme LPJP yang dinamik adalah bahwa para komisioner dan Badan Pekerja KP harus

terbuka dan sigap dalam menghadapi kritik konstruktif dan senang-tiasa mencari jalan untuk menyempurnakan diri. Forum ini menjadi kesempatan bagi KP untuk mengkomunikasikan berbagai tantangan yang dihadapi dan mengajak mitra-mitranya ikut mencari jalan keluar.

Sementara Sylvana Apituley, salah satu Wakil Ketua KP menyampaikan capaian-capaian KP dan kritik terhadap KP selama periode tiga tahun itu. Sylvana mengemukakan, LPJP disusun dalam empat bagian utama, yaitu:

1. Pandangan dan analisa KP tentang kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2007-2009;
2. Program dan kegiatan yang telah dilakukan KP selama tiga tahun, bersama dengan capaian-capaian dihasilkan bersama dengan mitra kerja KP;
3. Jejaring kemitraan yang telah berhasil dibangun KP; KP tidak pernah berjalan sendiri. Kepemilikan publik terhadap KP merupakan isu penting.
4. Arah ke depan dan anggota komisioner paripurna yang akan melanjutkan pekerjaan lima tahun ke depan.

Komnas Perempuan menilai, ada lima masalah kritis yang perlu perhatian dan penanganan khusus, yaitu:

1. Tantangan hak konstitusional perempuan dalam sistem hukum nasional dan daerah;

2. Hak perempuan dalam konflik dan pengungsian dan pelanggaran HAM masa lalu;
3. Masalah pemiskinan dan migrasi tenaga kerja;
4. Persoalan inisiatif untuk penguatan hak-hak korban; dan
5. Penguatan mekanisme HAP.

Tantangan internal yang menonjol dan perlu diatasi adalah merawat dan mengembangkan capaian lembaga serta terus melakukan penguatan kapasitas, baik menyangkut struktur, mekanisme lembaga maupun budaya kerja yang kondusif demi tercapainya tujuan KP.

Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, sebagai salah satu penanggap mengungkapkan rasa bangga dan simpatinya karena LPJP ini merupakan mekanisme pertama di tingkat nasional maupun regional. LPJP ini, menurutnya, penting karena mengajak semua mitra perempuan di berbagai daerah untuk bisa bersama-sama menegakkan hak-hak perempuan. Harkristuti menekankan, ke depan KP perlu mengintensifkan dialog dengan pihak pemerintah, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, termasuk pihak legislatif di daerah. Lembaga-lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) juga penting diajak dialog karena indikasi tentang pemahaman mereka yang masih diliputi kultur masa lalu sangat mempengaruhi kerja-kerja penegakan HAM. Selanjutnya, Harkristuti menyebutkan laporan-laporan dan rekomendasi KP yang sudah diterima Pemerintah, menurutnya, masih dibutuhkan mekanisme pemantauan, misalnya, sejauh mana laporan dan rekomendasi dari KP itu dibahas dan ditindaklanjuti Pemerintah. Terakhir, Harkristuti mengajak seluruh perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya di daerahnya dan mengajak KP menjadi salah satu institusi untuk memikirkan mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Leni Rosilawati, Asisten Deputi Perlindungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan masukan dan saran untuk KP. Agar lebih maju dan pro-perempuan, menurutnya, KP perlu melakukan pembenahan struktur dan membuat rencana dan

strategi yang matang yang disesuaikan dengan agenda pemerintah, misalnya RPJM 2010-2014 dan bagaimana komisioner terpilih 2010-2014 dapat menjawab rekomendasi dan tantangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Persoalan dan tantangan dari luar seperti isu desentralisasi juga harus menjadi perhatian KP. Kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia atau perempuan merupakan persoalan besar yang perlu diselesaikan dan menyangkut upaya negara. Menurut Estu, persoalan perempuan sangat kompleks mulai dari *trafficking* dan eksploitasi, migrasi, diskriminasi, pelanggaran hak atas akses, pelanggaran HAM dan juga pelanggaran HAM masa lalu yang masih belum teratasi.

Leni menawarkan tiga cara intervensi penanganan persoalan tersebut: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Ia menggarisbawahi pentingnya jaringan penanganan korban kekerasan sehingga rekomendasi LPJP ini dapat dipenuhi bersama-sama. Koordinasi dan kemitraan juga sangat ditekankan yang antara lain tercermin dari keinginan KPPPA untuk bekerjasama dengan cara menggunakan instrumen yang dibuat KP, yaitu pencegahan, pelayanan dan pemantauan proses layanan oleh pengelola layanan dan lembaga publik. Menurutnya, KP juga dapat memantau dan mengevaluasi upaya pemberdayaan di semua kementerian dan lembaga pemerintah. Leni mengungkapkan perlunya data kekerasan sehingga perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik dan penanganan terhadap korban dapat menjadi prioritas.

Estu Fanani, Direktur LBH Apik Jakarta sebagai penanggung ketiga mengapresiasi kerja KP. Ia mengakui, sekecil apapun upaya yang telah dilakukan dan capaian yang dihasilkan adalah bagian tak terpisahkan

dari gerakan perempuan. KP sebagai jembatan dalam gerakan perempuan memiliki tantangan tersendiri, karena KP perlu membangun kerjasama di antara organisasi masyarakat sipil (*civil society organization/ CSO*) dan pemerintah. Peran inilah yang harus dimaksimalkan para komisioner. Untuk level pemerintahan, yang perlu dilakukan adalah pendekatan-pendekatan tingkat tinggi, baik terhadap lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Menurut Estu, persoalan lain yang menjadi tantangan adalah hingga kini belum ada standar layanan terpadu sehingga perlu ada suatu mekanisme rujukan. Ini menjadi salah satu PR para komisioner periode 2010-2014 jika memang sistem rujukan akan tetap dilanjutkan. Penanganan kasus-kasus yang biasa diterima KP sendiri maupun lembaga-lembaga mitra rujukan perlu disosialisasikan. Kemungkinan adanya perbedaan model penerimaan kasus di antara KP dengan lembaga-lembaga mitranya perlu dicari titik temunya. Perlu dipikirkan pembentukan model penerimaan kasus yang dapat diterapkan di semua lembaga mitra untuk meminimalisir kendala-kendala dalam penanganan kasus, misalnya, harapan-harapan para korban yang datang ke KP dan ketidaknyamanan dalam relasi kemitraan dengan KP dalam sistem rujukan itu sendiri.

Yang perlu diperhatikan juga, menurutnya, adalah pengembangan sistem rujukan; perlu dimasukkan penguatan hukum bagi para korban. Dengan demikian, korban akan bisa memahami kasus yang dialaminya dan kaitannya dengan hak-haknya, termasuk hak-hak hukum.

Estu menyampaikan, kajian-kajian yang dilakukan KP perlu dijadikan sebagai pertimbangan bagi lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, serta lembaga masyarakat sebagai dasar penyusunan kerangka kebijakan. Selain itu, perlu keserasian dari para komisioner untuk memaksimalkan fungsi KP untuk meningkatkan citra kelembagaan sebagai institusi pemerintah yang independen dan dapat memberikan masukan bagi setiap lini pemerintah. Dengan demikian, upaya KP diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Terkait isu-isu tertentu yang belum menjadi perhatian serius KP, Estu menyuarakan beberapa di antaranya, misalnya, perempuan yang dimarginalkan, perempuan yang diasingkan, LGBT, perempuan miskin kota ataupun miskin pedesaan.

Terakhir, Estu menyoroti mekanisme perekrutan komisioner. Sebagai bagian dari gerakan perempuan, KP perlu menjaga semangat transparansi dan kepemilikan publik, terutama mereka yang bekerja dalam isu perempuan. Namun, setelah pemilihan, muncul opini-opini kritis yang perlu menjadi perhatian penting bagi para komisioner terpilih. Menurut Estu, para komisioner harus berani mengambil sikap untuk mengkaji kembali Anggaran Dasar KP untuk menjaga independensi dalam sistem atau mekanisme perekrutan tersebut agar akuntabilitas dan transparansi KP dapat diakui publik dan dapat menjadi contoh.

Semoga, dengan berbagai masukan dan kritik dalam LPJP ini, KP bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengusahakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di bumi Indonesia ini.

## AKTIVITAS

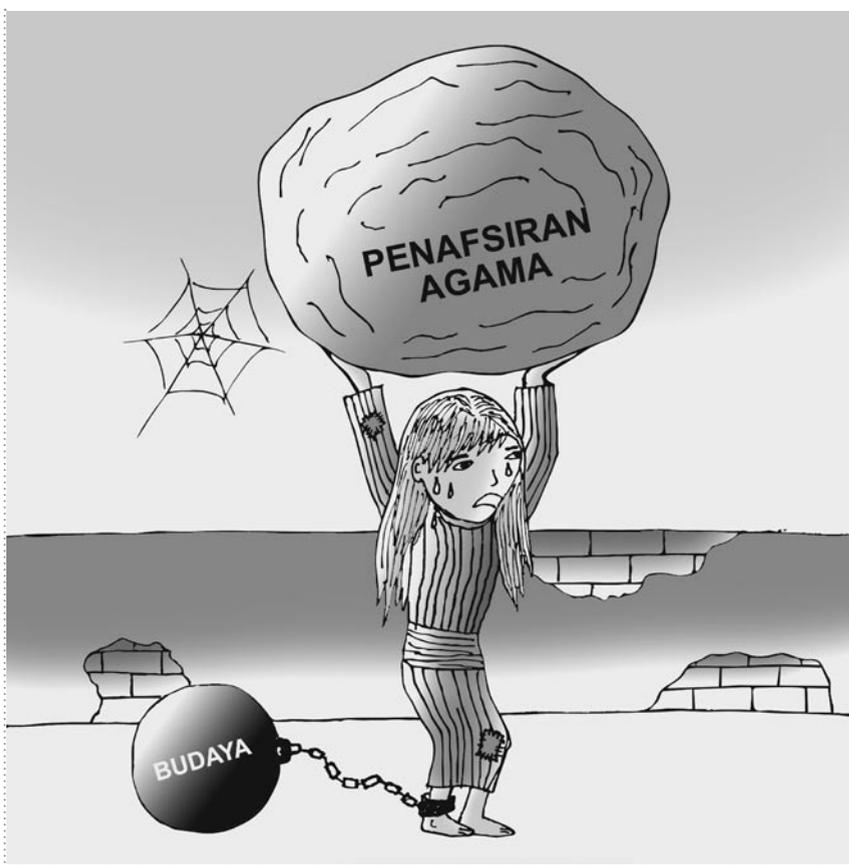
# Screening dan Diskusi Film “Water”: Membongkar Ruang Isolasi Para Janda

Oleh Diah Irawaty

Film Screening dan Diskusi merupakan kegiatan rutin Redaksi Komnas Perempuan. Pada episode 28 Oktober 2009, *event* ini mengangkat film “Water” karya sutradara India, Deepa Mehta (2006). Film berdurasi 117 menit dengan latarbelakang budaya-keagamaan India ini bercerita tentang Chuyia, gadis yang sejak usia delapan tahun telah menjadi janda. Sejak kecil orang tuanya telah menjodohkan dan menikahnya dengan seorang laki-laki uzur yang akhirnya meninggal. Chuyia dikirim ke “panti” janda; ia harus mengenakan pakaian putih dan kepala dicukur habis alias botak, bergaul dengan para perempuan janda yang tak muda lagi. Mereka hidup dan mati di sana, seakan-akan pasrah pada nasib. Mereka diisolasi dari kehidupan manusia umumnya.

Benarkah mereka pasrah dan ikhlas? Inilah yang penting dari film ini, mengungkap hal-hal yang bukan takdir yang tak boleh diterima ikhlas, tetapi sisi sosial, budaya dan pandangan agama yang perlu diubah. Bertahun-tahun tinggal di sana, dicekoki ajaran agama yang menuntut penerimaan total membuat mereka tak pernah berpikir untuk mempertanyakan kondisi tersebut, apalagi memberontak, dan mengupayakan perubahan. Mengapa perlu pemberontakan, perlu perubahan?

Di sana terjadi diskriminasi. Para janda tidak diperkenankan bergaul dengan masyarakat umum, berteman dengan laki-laki, apalagi berpacaran atau menikah lagi. Jangankan diri mereka untuk hadir di ruang publik, bayangan mereka pun tidak boleh jatuh pada air suci sungai Gangga, tempat para perempuan India mengambil air. Kehidupan para janda ini juga tidak dijamin oleh pemerintah. Mereka bingung mencari uang untuk mengkremsi salah seorang dari mereka yang meninggal dunia. *Water* atau air adalah simbol akses pada kehidupan, dan janda itu tak memilikinya.



Seorang janda yang sadar akan praktek diskriminasi dan penindasan hak-hak kaumnya menyelamatkan Chuiya kecil yang akan dijual demi *survival* kolega sepuhnya. Mengorbankan yang lain –yang diposisikan lemah– melalui *trafficking* menjadi jalan pintas untuk bertahan hidup. Dalam film ini, Chuiya dikorbankan dengan menjualnya agar para janda yang lain dapat tetap bertahan hidup. Si kecil Chuiya yang bergaul dengan janda muda cantik yang jatuh cinta dengan seorang laki-laki dan berencana menikah lalu menjadi simbol pembangkangan para janda tersebut atas tradisi diskriminatif itu.

Diskusi film ini menghadirkan Nani Zulminarni dari Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagai pembahas dan pengulas film. Sebelum diskusi lebih lanjut, dibuka forum *sharing* (berbagi) tentang eksploitasi, marginalisasi dan kekerasan yang sering dialami para janda. Seorang peserta mengungkapkan opininya dengan menyebut laki-laki yang mempunyai kuasa ada di balik semua itu. Peserta lain menolak. Meskipun dalam film tersebut digambarkan pelakunya adalah laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial dan budaya di sekitarnya, termasuk perempuan yang mempunyai kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya sehingga *trafficking* sesama janda, utamanya janda baru di *camp* janda menjadi cara lumrah demi kelangsungan hidup.

Sementara, Nani mengungkapkan, ada sebuah sistem yang berkonspirasi secara terus-menerus membentuk pikiran-pikiran perempuan dan laki-laki. Dalam film ini, pihak yang melestarikan itu, pelaku-pelaku kekuasaan itu, adalah perempuan, seperti para mucikari yang banyak berjenis kelamin perempuan. Menurutnya, ini merupakan *hidden power*, dimana laki-laki tidak ada pada tataran itu.

Hal lain yang disoroti Nani adalah soal penafsiran agama, yang tidak terlalu dibuka film ini. Tafsir agama yang dominan di masyarakat seringkali memperlihatkan kecenderungan mendiskreditkan, mendiskriminasi, memarginalkan dan mengisolasi para janda. Diskriminasi semacam ini tidak hanya berlangsung di India, namun di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dengan derajat dan jenis yang berbeda tergantung pola pikir, ideologi patriarki dan nilai-nilai maskulinitas dalam satu masyarakat. Dalam tradisi Batak, misalnya, para janda dibatasi gerak dan ruang berekspresinya; mereka harus menutup kepalanya.

Nani mengomentari penentangan kaum Hindu konservatif terhadap pembuatan film ini, sehingga film ini akhirnya dibuat di Srilangka. Menurutnya, sosok-sosok pemangku kekuasaan yang melingkupi seorang janda sangat berperan penting. Kita bisa melihat satu perempuan di film tersebut, sebagai pemilik kekuasaan tersembunyi: mengatur dan mengendalikan kehidupan orang-orang yang tidak berdaya. Di sisi lain, juga ada kekuasaan lain dalam diri perempuan ini yang membuatnya tidak berani keluar dari lingkaran nilai-nilai dalam masyarakat itu.

Nani membandingkan dengan realitas janda di Indonesia. Di Aceh, menurutnya, tubuh janda dianggap najis; di NTT, janda ditinggal suami meninggal harus berkabung selama setahun, tak boleh keluar rumah karena dianggap mengotori kematian suaminya. Padahal di NTT para janda hidup dalam kemiskinan. Mereka juga harus menjadi kepala keluarga. Sungguh berat menjadi kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga dalam kondisi tidak boleh keluar, tidak bisa bekerja. Mereka lalu mempekerjakan anaknya; yang sedang bersekolah disuruh berhenti.

Tafsir agama yang tidak pro-janda menjadi sumber utama yang membuat posisi janda lebih rendah dari yang lainnya. Para janda ini diposisikan seperti itu karena ada faktor interpretasi agama yang sangat luar biasa yang dibakukan. Kalau dikaitkan dengan agama, ujung-ujungnya adalah soal dosa dan neraka. Inilah yang ditakutkan banyak orang.

Nani juga menekankan pentingnya mempersoalkan supremasi gender yang tidak berimbang dalam pembicaraan tentang kondisi janda. Supremasi gender ini tidak berarti melawan laki-laki dengan perempuan, tetapi melihat dimensi kekuasaan yang ada dalam situasi tersebut. Dimensi kekuasaan ini potensial baik pada laki-laki ataupun perempuan. Dalam film ini tidak ada laki-laki; perempuan yang menjadi pelaku sekaligus korban dalam sistem kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan itu berbentuk orang-orang dan juga nilai-nilai yang tersembunyi.

Karena ada dimensi kekuasaan, maka, menurut Nani, sangat penting bagi kita untuk memulai upaya perubahan dengan membangun kekuatan bersama. Solidaritas sosial sebagai perempuan dan sebagai janda harus dibangun sebagai alat perlawanan, sekaligus upaya penguatan eksistensi mereka. Setelah penguatan ini, perubahan cara pandang tentang adanya konstruksi sosial-budaya yang mendiskriminasi janda harus diupayakan dan disosialisasikan lebih intensif. Ini juga yang menjadi strategi Pekka yang bergerak melakukan pemberdayaan perempuan janda.

Oleh Soraya,  
Divisi Pengembangan  
Sistem Pemulihan Komnas  
Perempuan

## Temu Nasional Forum Belajar Pengada Layanan: Memperkuat Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemulihan



Dok. Komnas Perempuan.

Sejak tahun 2000, Komnas Perempuan melalui Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan telah memfasilitasi terbentuknya jaringan lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang dinamakan Forum Belajar. Jaringan yang beranggotakan 33 organisasi masyarakat pengada layanan (*women's crisis center* dan Lembaga Bantuan Hukum) pada awal pembentukannya ini difasilitasi Komnas Perempuan untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas hingga tahun 2006. Sampai Agustus 2009, keanggotaan Forum Belajar mencapai 99 organisasi, terdiri dari 40 persen institusi pemerintah dan 60 persen organisasi masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut termasuk Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), Badan atau Bidang atau Biro Pemberdayaan Perempuan di tingkat Propinsi maupun Kabuapten atau Kota, *women's crisis center* (WCC), LBH Apik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pada Desember 2009, Forum Belajar memasuki usia sembilan tahun. Beberapa capaian telah berhasil digapai, misalnya, advokasi berbagai isu dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal. Keterlibatan institusi pemerintah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu juga menjadi hal penting yang bisa dicapai Forum Belajar. Keterlibatan pemerintah tersebut menjadi dukungan baru bagi forum ini untuk lebih mengembangkan kerjasama antara organisasi pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah masing-masing yang selama ini belum terjalin dengan baik.

Tanggal 18-19 Agustus 2009, Komnas Perempuan memfasilitasi pertemuan nasional Forum Belajar ke V. Pertemuan ini dihadiri 41 lembaga yang merupakan perwakilan dari region barat, tengah dan timur serta representasi organisasi masyarakat dan institusi pemerintah serta beberapa lembaga donor. Pertemuan ini dibuka Ketua Komnas Perempuan, saat itu Kamala Chandrakirana, dan dihadiri sembilan orang narasumber dari Departemen Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Surakarta, Anggota DPRD Propinsi Maluku dan UNFPA.

Beberapa isu besar terkait dengan pengalaman kerja-kerja anggota Forum Belajar selama ini disampaikan para narasumber terkait dengan kebijakan lembaganya dalam (1) Membangun Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemulihan Korban, (2) Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan (3) Akses Anggaran bagi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dan Pengembangan Forum Belajar. Dari beberapa isu yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut, penanganan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan akses terhadap anggaran untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang paling hangat didiskusikan dalam sesi seminar. Hal tersebut terkait keberpihakan aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri pada sebagian besar kasus itu justru menimbulkan kekerasan baru.

Di samping itu, akses terhadap anggaran terutama di daerah untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan tersendiri dalam menyelenggarakan layanan. Situasi ini dialami terutama oleh organisasi-organisasi masyarakat. Karenanya, dalam pertemuan ini juga diidentifikasi berbagai pihak yang menjadi sumber anggaran potensial untuk dapat diakses, baik lokal, nasional maupun internasional. Dalam hal ini, mengupayakan anggaran yang sensitif gender (*gender budgeting*) dan pemanfaatan setiap potensi serta memahami strategi dalam mengakses potensi tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Terkait perlindungan saksi dan korban, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, menyampaikan bahwa keputusan terkait perlindungan saksi dan korban ada pada LPSK, meskipun yang melaksanakan perlindungan bisa LPSK sendiri atau lembaga lain. Selain itu, menurutnya, saksi atau korban yang terancam jiwanya sudah menjadi bukti cukup untuk mendapat perlindungan dari lembaga ini. Saat ini, LPSK sedang melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga penegak hukum untuk penerapan PP Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pertemuan nasional ini sebisa mungkin dilaksanakan Komnas Perempuan setiap tahun, pertemuan ini adalah media bersama dalam mengkonsolidasikan pengetahuan perkembangan layanan bagi perempuan korban selama setahun. Oleh sebab itu, forum ini tidak hanya menjadi forum koordinasi jaringan, tetapi juga digunakan untuk *sharing capacity* (berbagi kapasitas) antar sesama anggota termasuk memperkenalkan isu-isu terbaru di tingkat nasional oleh Komnas Perempuan.

### Rekomendasi

Pertemuan nasional yang berlangsung selama 2 hari ini merekomendasikan beberapa poin penting, baik untuk pemerintah di tingkat nasional dan daerah -- tersebut adalah:

1. Melibatkan lembaga-lembaga layanan dalam perumusan setiap kebijakan.
2. Membuka akses publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Mengalokasi dana khusus di APBN dan APBD bagi lembaga-lembaga pengada layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
4. mengembangkan standarisasi layanan yang berbasis pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Akhirnya, semoga ke depan melalui forum seperti ini, upaya pemulihan perempuan korban kekerasan di negeri kita bisa dilakukan secara lebih terpadu dengan keterlibatan maksimal berbagai lembaga, baik pemerintah maupun daerah.

## Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seseorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proposional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi (CEDAW), walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan. (Rekomendasi Umum No.19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan, ayat 6)

## Pengabaian dan Pembiaran Negara

Pengabaian dan Pembiaran oleh Negara: disebut juga *state omission* merupakan bentuk kekerasan oleh negara (*state violence*), di mana negara (1) tidak memenuhi kewajiban yang dituntut oleh hukum atau Undang-undang, (2) sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan. (terjemahan/interpretasi dari definisi omission di <http://www.yourdictionary.com/law/omission>)

## Kekerasan Berlapis

Sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi pada korban yang sama dalam rentang waktu tertentu. Antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lain kadang memiliki hubungan sebab akibat, namun terkadang juga tidak ada kaitannya sama sekali. (Sumber: Glosari, Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan)

## Pelanggaran HAM Berat

Undang-undang Pengadilan HAM (UU 26/2000) menyebut dua macam kejahatan yang tercakup dalam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (lihat pasal 1 (2) dan pasal (7). Sedangkan, Statua Roma yang mengatur mengenai Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menyebut 4 macam kejahatan yang tercakup dalam *the most serious crimes of international concern* (kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional), yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan. (definisi lihat [UU No.26/2000, Pasal 9 dan Penjelasan; Satuta Roma, Pasal 7] kejahatan perang dan kejahatan agresi [lihat pasal 5 (1)])

## Layanan Terpadu

Layanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan korban kekerasan melalui penanganan medis, hukum dan psikososial berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi baik dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama, bertanggungjawab dan terjangkau oleh masyarakat. (Sumber: Glosari, Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan)

## Hak Konstitusional Perempuan

Merupakan hak-hak perempuan dan warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang telah termaktub di dalam konstitusi negara Indonesia. Komnas Perempuan telah mendaftarkan 40 hak konstitusional perempuan dalam 14 rumpun, yaitu: Hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan hak, hak atas pemerintahan. (Sumber: Glosari, Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan)

## Anggota Komisi Paripurna

Komisi Paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Paripurna dipilih setiap lima tahun sekali dan hanya dapat dijabat untuk dua masa periode. Tugas Komisi Paripurna adalah, melaksanakan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden; Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (Sumber: Glosari, Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan)

## Kejahatan Genosida

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara. Membunuh anggota kelompok; b. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. Memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. [UU No.26/2000, Pasal 8 dan Penjelasan; Satuta Roma, Pasal 6]



## Jadilah Sahabat Pundi Perempuan dan mendukung Pundi Perempuan dengan cara:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan publik Pundi Perempuan
2. Menyumbang secara langsung atau tunai melalui kegiatan publik yang dilakukan Pundi Perempuan
3. Mentransfer ke rekening Pundi Perempuan
  - a. **Bank Niaga Cabang Jatinegara - Jakarta Timur**  
**No. Rek: 025-01-00098-00-3**  
A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
  - b. **Bank BCA Cab. Matraman**  
**No. Rek. 3423059008**  
A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
  - c. **Bank Mandiri Cab. Salemba Raya**  
**No. Rek. 1230005290004**  
A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
4. Membeli alat kampanye Pundi Perempuan.

atau informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
Jl. Latharhary No.4b, Menteng.  
Jakarta Pusat 10310  
Telp. 021 3903963. Fax. 021 3903922  
email : pundiperempuan@  
komnasperempuan.or.id  
website : www.komnasperempuan.  
or.id, atau

Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan  
Jl. Salemba Tengah No. 39BB, Jakarta Pusat 10440

**Telp. 021 392 8562, 3156907-8**  
**Fax. 021 319 06863**  
**Email : info@ysik.org**  
**Website : www.ysik.org**

## Kunjungan Lapangan Pundi Perempuan:

### Memelihara Kebersamaan, Melanjutkan Perjuangan

Oleh Siti Maesaroh

Pundi Perempuan merupakan program penggalangan dana publik yang digagas Komnas Perempuan dan dikelola YSIK (Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan). Dana yang terkumpul lewat Pundi Perempuan, diperuntukkan bagi *women's crisis center* (WCC) atau lembaga pengada layanan kasus dan lembaga yang menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini telah berlangsung selama tujuh tahun.

Semangat keberlanjutan kental mewarnai harapan para penggiat lima organisasi mitra penerima Pundi Perempuan Komnas Perempuan dalam kunjungan mitra yang dilakukan akhir tahun 2009 lalu. Mereka adalah para perempuan korban kekerasan dan perempuan pembela HAM yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di wilayah Yogyakarta, Sragen, Boyolali dan Magelang. Kegiatan kunjungan Pundi Perempuan merupakan bagian dari acara *monitoring* yang bertujuan sebagai wadah pertemuan dan komunikasi lebih mendalam antara pengelola Pundi Perempuan dengan organisasi mitra penerima Pundi Perempuan. Kegiatan kali ini merupakan kunjungan kedua dari kegiatan serupa yang pernah dilakukan pada tahun 2005.

Salah satu kunjungan dilakukan pada dua organisasi atau perkumpulan perempuan korban kekerasan politik periode 1965-1966, yaitu Kiprah Perempuan di Yogyakarta dan Paguyuban Perempuan Lanjutan "Wiji Asih" di Boyolali. Kedua organisasi ini menerima Pundi Perempuan tahun 2008 dan sama-sama menjalankan program penguatan ekonomi dan sosial organisasi atau paguyuban perempuan korban 1965-1966.

Salah satu kondisi yang dihadapi korban kekerasan politik 1965-1966 adalah peminggiran hak di bidang ekonomi. Mereka dan keluarganya terus-menerus dibebani stigma sebagai anggota PKI yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada akses mereka pada pekerjaan maupun usaha yang hendak mereka jalankan. Kedua kelompok perempuan korban ini memanfaatkan Pundi Perempuan untuk pengadaan modal usaha pertanian dan peternakan, sementara sisanya untuk modal koperasi simpan pinjam. Secara rutin, anggota kelompok ini melakukan pertemuan anggota yang juga ditujukan sebagai ajang untuk pemulihan sebagai perempuan korban kekerasan.

Kunjungan juga dilakukan ke pusat krisis untuk perempuan korban kekerasan atau *women's crisis center* (WCC) Sahabat Perempuan di Magelang yang menerima Pundi Perempuan tahun 2006 dan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) di Sragen, penerima Pundi Perempuan tahun 2009. Kedua organisasi ini menjalankan program pendampingan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di daerahnya masing-masing. APPS Sragen, selain melakukan pendampingan, juga dengan penuh semangat membuat kelas-kelas keterampilan khusus bagi perempuan korban kekerasan seperti menjahit dan membuat penganan (makanan kecil). Kreativitas para perempuan ini memang menjadi keistimewaan, selain juga karena tuntutan aktivisme sosial mereka yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sahabat Perempuan Magelang juga berupaya dengan menulis pengalaman mereka melakukan pendampingan korban dalam buku kecil berjudul *Dari Gunung ke Gunung: Pengalaman Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*.

Meski jumlah dana yang diterima terbatas, namun Pundi Perempuan membuat mereka bisa berkiprah dalam mendampingi dan menguatkan perempuan korban kekerasan. Pengalaman ini membuat mereka mendorong program Pundi Perempuan terus berlanjut agar lebih banyak lagi organisasi perempuan yang dapat berkiprah. Artinya lebih banyak lagi korban terlayani, menjadi kuat dan berdaya. Dengan begitu, Pundi Perempuan, yang lahir sebagai inisiatif demi meningkatkan dukungan dan partisipasi publik, akan semakin nyata memberikan perubahan bagi mereka, sekecil apapun.